

**ANALISIS PENINGKATAN RETRIBUSI DAERAH MELALUI
PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN ACEH
TENGAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Ekonomi Pembangunan*



Oleh

Nama : Rafni
NPM : 1505180002
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

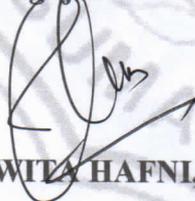
MEMUTUSKAN

Nama : RAFNI
NPM : 1505180002
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENINGKATKAN RETRIBUSI DAERAH
MELALUI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI
KABUPATEN ACEH TENGAH

Dinyatakan : (B/A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I



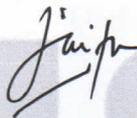
(Dra. Hj. ROSWITA HAFNI, M.Si)

Penguji II



(HASTINA FEBRIATY, SE, M.Si)

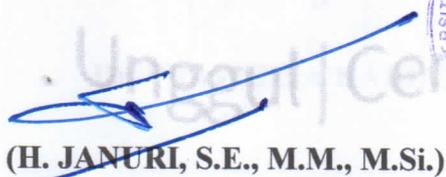
Pembimbing



(Dra. Hj. LAILAN SAFINA HSB, M.Si)

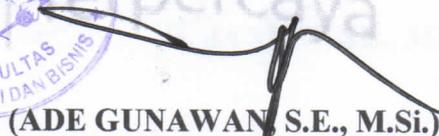
Panitia Ujian

Ketua



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris



(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : RAFNI
N.P.M : 1505180002
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENINGKATAN RETRIBUSI DAERAH
MELALUI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI
KABUPATEN ACEH TENGAH

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi



Dra. Hj. LAILAN SAFINA, M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



Dr. PRAWIDYA HARIANI RS

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



H. JANURI, SE., MM., M.Si

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah? Dan bagaimana strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan objek pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara deskriptif perkembangan sektor pariwisata dan strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan objek pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah. Masih banyak potensi wisata potensi di Kabupaten Aceh Tengah yang belum dikembangkan. Peningkatan retribusi daerah di Kabupaten Aceh Tengah mengalami peningkatan tetapi masih relatif kecil untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metodologi penelitian merupakan analisis deskriptif dari data yang dianalisis bahwa perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam mengembangkan sektor pariwisata yakni dengan mempromosikan objek wisata. Sektor pariwisata tidak memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Tengah karena sarana dan prasarana yang ada di objek wisata kurang memadai.

Kata kunci : Sektor Pariwisata, Retribusi Daerah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berisikan hasil penelitian penulis yang berjudul “**Analisis Peningkatan Retribusi Daerah Melalui Pengembangan Objek Wisata di Kabupaten Aceh Tengah**”.Shalawat dan salam tak lupa saya ucapkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. yang mana ia telah membuka pintu pengetahuan bagi kita tentang ilmu hakiki dan sejati yang dituntun untuk menggapai duniawi dan akhirat.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis yaitu : yang Teristimewa untuk Ayahanda (**Selamat AB**) dan Ibunda tercinta (**Katiyem**) yang telah membesarkan dan mendidik penulis bisa seperti sekarang ini dan terima kasih telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis baik material maupun doa yang tiada hentinya. Mudah-mudahan penulis dapat dapat membahagiakan Ayanhanda dan Ibunda kelak. Amin

2. Kakak dan Abang tersayang **Karmila Wati, Hairiyah, Husna Wati, dan Muhammad Toha** yang menjadi penyemangat dalam perjuangan menuntut ilmu dan penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan yaitu kepada :

1. Bapak **Dr.Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)
2. Ibu **Dra.Hj.Lailan Safina, M.Si** selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak membantu dan memberikan arahan penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu **Dr.Prawidya Hariani RS** selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan UMSU
4. Ibu **Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si** selaku Sekretaris Program studi Ekonomi Pembangunan UMSU
5. Seluruh dosen-dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
6. Seluruh Pegawai dan Staf Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu penulis selama ini.
7. Untuk teman-teman A Pagi Ekonomi Pembangunan stambuk 2015, terima kasih telah banyak membantu penulis selama perkuliahan dan dalam menyusun skripsi di FEB UMSU dan 3,5 tahun kita bersama-sama belajar

serta bercanda riang dalam kelas, saling membantu dalam hal apapun tidak akan pernah terlupakan selamanya.

8. Sahabat seperjuangan yang penulis sayangi (**Asa Dewi, Dian Isnaini dan Cindy Ranika**) yang telah memberikan semangat, dukungan, motivasi, nasehat dan membantu penulis selama menyusun skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini dan tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Semoga amal kebaikan dari semua pihak di atas mendapat imbalan yang berlipat dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis khususnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Maret 2019

Penulis

Rafni

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	14
1.3 Batasan Masalah	14
1.4 Rumusan Masalah	14
1.5 Tujuan Penelitian	14
1.6 Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Landasan Teoritis	16
2.1.1 Target Pendapatan Daerah	20
2.1.2 Kriteria Sumber Penerimaan Daerah	21
2.1.3 Retribusi Daerah.....	22
2.1.4 Ciri-ciri Retribusi Daerah.....	26
2.1.5 Pariwisata	30
2.1.6 Pengertian Objek Wisata.....	33
2.1.7 Pembangunan Pariwisata	35
2.1.8 Konsep Pembangunan Daya Tarik Wisata.....	37
2.1.9 Pengembangan Pariwisata.....	40
2.2 Penelitian Terdahulu	43
2.3 Kerangka Konseptual	47

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	48
3.1 Pendekatan Penelitian	48
3.2 Defenisi Oprasional.....	48
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	50
a. Tempat Penelitian	50
b. Waktu Penelitian	50
3.4 Jenis Sumber Data.....	51
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.3 Teknik Analisi Data	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Hasil Penelitian	52
4.1.1 Luas dan Batas Wilayah.....	52
4.1.2 Letak dan Kondisi Geografis	53
4.1.3 Topografi.....	54
4.1.4 Demografi	55
4.1.5 Pertumbuhan Ekonomi.....	57
4.1.6 Kemiskinan	59
4.1.7 Indeks Pembagunaan Manusi.....	60
4.1.8 Inflasi	61
4.1.9 Pendapatan Asli Daerah	62
4.2 Pembahasan... ..	68
4.2.1 Analisi Perkmbangan Pariwisata Aceh Tengah	68
4.2.2 Pengembangan Retribusi Daerah	75
4.3 Analisi Kebijakan Pemerintah Dalam Mengembangkan Pariwisata	76
4.4 Upaya Pengembangan Objek Wisat	80
4.6 Kendala Dalam Melestarikan Objek wisata	83
4.3 Hasil Kousioner.....	84

Bab V	PENUTUP.....	91
5.1	Kesimpulan.....	91
5.2	Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	95

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	42
Gambar 4.1Peta Admitrasi Wilayah Kabuypaten Aceh Tengah	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor pariwisata menjadi salah satu potensi daerah yang banyak dikembangkan oleh masyarakat. Menurut Pendit (2006) pariwisata merupakan alternatif yang dapat digali dan dikembangkan, berdasarkan alam dan sosial budaya yang ada, namun tergantung daerah masing-masing upaya menggali potensi daerahnya sehingga dapat dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata. Kegiatan pariwisata banyak mendatangkan keuntungan pada masyarakat, daerah dan Negara sehingga sektor pariwisata berusaha digalakkan oleh pemerintah untuk sumber pendapatan.

Pariwisata adalah salah satu dari industri gaya baru, yang mampu meyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara penerimaan wisatawan (Wahab (2003). Berkembangnya pariwisata di suatu daerah akan mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat, yakni secara ekonomi, sosial dan budaya. Namun, jika pengembangannya tidak dipersiapkan dan dikelola dengan baik, justru akan menimbulkan berbagai permasalahan yang menyulitkan atau bahkan merugikan masyarakat. Untuk menjamin supaya pariwisata dapat berkembang secara baik dan berkelanjutan serta mendatangkan manfaat bagi manusia dan mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul maka

pengembangan pariwisata perlu didahului dengan kajian yang mendalam, yakni dengan melakukan penelitian terhadap semua sumber daya pendukungnya (Wardiyanta, 2006).

Dari sudut sosial, kegiatan pariwisata akan memperluas kesempatan tenaga baik dari kegiatan pembagunan sarana prasarana maupun berbagai sektor usaha yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kepariwisataan. Pariwisata akan dapat menumbuhkan dan meningkatkan pengenalan dan cinta terhadap tanah airnya, sehingga dapat momotifasi sikap toleransi dalam pergaulan yang merupakan kekuatan dalam pembagunan bangsa, selain itu juga pariwisata mampu memperluas cakrawala pandangan pribadi terhadap nilai-nilai kehidupan.

Dari sudut ekonomi bahwa kegiatan pariwisata dapat memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah bersumber pajak, retribusi parkir dan karcis atau dapat mendatangkan devisa dari para wisatawan manca negara yang berkunjung. Adanya pariwisata juga akan menumbuhkan usaha-usaha ekonomi yang saling merangkai dan menunjang kegiatannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Indonesia merupakan negara di kawasan Asia Tenggara yang dilintasi oleh garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta diapit oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sebagai negara yang kaya akan budaya dan pariwisata, Indonesia memiliki modal untuk mengembangkan industri pariwisatanya. Maka, sejak awal tahun 2011, Indonesia mencetuskan *tagline* baru pariwisatanya, yaitu “*Wonderful Indonesia* ” yang menggambarkan daya tarik masyarakatnya, budayanya, makannya, investasinya, dan alamnya.

Kekayaan alam dan budaya merupakan komponen penting dalam pariwisata di Indonesia. Alam Indonesia memiliki kombinasi iklim tropis, 17.508 pulau yang 6.000 di antaranya tidak dihuni, serta garis pantai terpanjang ketiga di dunia setelah Kanada dan Uni Eropa. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar dan berpenduduk terbanyak di dunia. Tahun 2010 terdapat 7 lokasi di Indonesia yang telah ditetapkan oleh UNESCO yang masuk dalam daftar Situs Warisan Dunia. Sementara itu, empat wakil lain yang juga ditetapkan UNESCO dalam Daftar Representatif Budaya Takbenda Warisan Manusia yaitu wayang, keris, batik dan angklung. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, sebelas provinsi yang paling sering dikunjungi oleh para turis adalah Bali sekitar lebih dari 3,7 juta disusul , DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Banten dan Sumatera Barat.

Perkembangan pariwisata sebagai industri merupakan suatu hal yang penting bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang mempunyai peran penting dalam struktur sumber devisa negara. Perkembangan pariwisata juga mendorong dan mempercepat pendapatan Produk Domestik Regional Bruto. Kegiatan pariwisata menciptakan permintaan, baik konsumsi maupun investasi yang pada gilirannya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Selama berwisata, wisatawan berbelanja, sehingga secara langsung menimbulkan permintaan akan barang modal dan bahan untuk memproduksi, memenuhi permintaan wisatawan diperlukan investasi di bidang transportasi dan komunikasi, perhotelan dan akomodasi lain, industri kerajinan dan industri produk konsumen, industri jasa, rumah makan restoran dan lain-lain.

Tabel 1.1
Nilai (PDB) Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga konstan Tahun 2013-2015

Sektor	Tahun		
	2013	2014	2015
Pertanian	1.083.141,8	1.129.052,7	1.171.578,7
Pertambangan dan Penggalian	791.0154,4	794.489,5	767.327,2
Industri pengolahan	177.196,9	185.425,7	1.934.533,2
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.539,9	6.882,5	7.369
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan sepeda motor	1.119.272,1	1.177.297,5	120.7751,1
Transportasi pergudangan	304.506,2	326.933,0	384.773,8
Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	243.748,3	257.815,5	268.992,4
Informasi dan Komunikasi	349.15,1	384.475,6	421.741,4
Jasa Keuangan dan Ansuransi	305.515,1	319.825,5	34.730,6
Real Estate	244.237,5	256.440,2	266.979,6
Jasa Perusahaan	125.490,7	137.795,3	148.395,5

Admitrasi Pemerintah, Pertahanan Jaminan Sosial Wajib	289.448,9	296.329,7	310.054,2
Jasa Pendidikan	250.016,2	263.685	283.020,1
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	84.621,4	91.357,1	97.463
Jasa Lainnya	12.308,1	134.070,1	144.902,4

sumber : www.bps.go.id

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013 sektor pariwisata menyumbang sebesar 243748,3 atau 2.40% sedangkan pada tahun 2014 mengalami peningkatan yaitu sebesar 2,60% dan untuk tahun 2015 sebanyak 2.70%. Jadi dari tahun 2013-2015 sektor pariwisata mengalami kenaikan setiap tahunnya

Pariwisata di Indonesia merupakan sektor ekonomi penting di Indonesia, pada tahun 2009, pariwisata menempati urutan ketiga komoditi dalam hal penerimaan devisa setelah komoditi minyak dan gas bumi serta minyak kelapa sawit. Berdasarkan laporan *The World Travel & Tourism Council (WWTC)*, Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan pariwisata paling bagus di antara negara-negara G20. Salah satu tempat wisata di Indonesia berada di Provinsi Aceh.

Aceh adalah sebuah Provinsi di Indonesia yang beribukota Banda Aceh. Aceh terletak di ujung pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di bagian Indonesia. Jumlah penduduk provinsi ini sekitar 4.500.000 jiwa. Aceh dianggap

sebagai tempat dimulainya penyebaran Islam di Indonesia dan memegang peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Oleh sebab itu, Aceh dijuluki sebagai Kota Serambi Mekkah.

Aceh merupakan tempat wisata yang kerap dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun internasional, ada banyak tempat wisata menarik di Aceh. Hal ini karena Aceh memiliki destinasi wisata bahari, sejarah alam, kuliner yang berbeda antara yang satu dengan daerah lain di Indonesia. Salah satunya adalah Masjid Raya Baiturrahman Aceh. Masjid Raya Baiturrahman adalah masjid terbesar dan termegah di Aceh. Masjid ini mempunyai arsitektur yang sangat indah dan terletak di Pusat Kota Banda Aceh. Masjid raya Baiturrahman merupakan salah satu bukti bisu terjadinya Tsunami yang melanda Kota Banda Aceh pada Tanggal 26 Desember 2004. Industri Pariwisata di Aceh pada saat ini sangat berkembang, mulai dari begitu banyaknya objek wisata seperti peninggalan masa kerajaan Islam dan peninggalan musibah gempa tsunami 2004 silam. Selama tahun 2011 arus wisatawan terlihat meningkat, hampir setiap hari silih berganti wisatawan datang berkunjung ke Aceh. Wisatawan berasal dari berbagai kalangan, baik lokal, nusantara dan mancanegara.

Berdasarkan data BPS Aceh tahun 2015, sektor pariwisata telah memberikan kontribusi sebesar 4,33 persen kepada PDRB Aceh atau sebesar Rp 5, triliun. Nilai ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meski demikian, sektor pariwisata masih berada pada urutan ke 8 sebagai pemberian kontribusi bagi PDRB Aceh. Jika sektor wisata berkembang dengan baik, maka sektor usaha lain akan turut meningkat, sehingga aktivitas usaha masyarakat semakin mengeliat. Dengan begitu, pariwisata akan dapat tampil sebagai salah satu sektor

usaha yang mampu berkontribusi optimal bagi pembagunaan nasioanal. Salah satu tempat wisata yang perlu di kembangankan yaitu di Kabupaten Aceh Tengah.

Kabuapten Aceh Tengah adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Ibu kotanya adalah Takengon, sebuah kota kecil berhawa sejuk yang berada di salah satu bagian punggung pengunungan Bukit Barisan yang membentang sepanjang Pulau Sumatera. Kabuapten Aceh Tengah berada di kawasan Dataran Tinggi Gayo. Kabupaten lain yang berada di kawasan ini adalah Kabupaten Bener Meriah serta Kabupaten Gayo Lues. Pada masa lalu daerah gayo merupakan kawasan yang terpencil sebelum pembagunaan jalan dilaksanakan di daerah ini. Kabuapten Aceh Tengah memiliki 14 kecamatan yang terdiri dari 295 kampung.

Tabel 1.2
PDRB Kabupaten Aceh Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun (Juta Rupiah) 2013-2015

PDRB Lapangan Usaha	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku		
	Tahun 2013-2015 (Juta Rupiah)		
	2013	2014	2015
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2324165.10	2474336.50	2639688.80
B. Pertambangan dan Penggalian	65938.90	75942.30	80951.70
C. Industri Pengolahan	73779	83143.60	91256.20
D. Pengadaan Listrik dan Gas	3897.80	4199.50	4576.10
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	1769.70	1933.10	2095.50

dan Daur Ulang			
F. Konstruksi	611349.40	673865.10	744555
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	643700	705294.10	764294.50
H. Transportasi dan Pergudangan	229449.70	238301.80	244212.90
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	61027.50	69068.70	77072
J. Informasi dan Komunikasi	148179.40	155248.90	162759
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	93760.40	107697.30	116410.20
L. Real Estate	151932.40	162751	174049
M,N. Jasa Perusahaan	28077.80	29261.70	30745
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	388198.40	424459.40	481020
P. Jasa Pendidikan	80853.80	84911.10	89968.40
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	104901.20	110624.70	118266
R,S,T,U. Jasa Lainnya	60393.70	61496	64578.20
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5071374.05	5462534.54	5886498.69

PDRB NONMIGAS	5071374.05	5462534.54	5886498.69
--------------------------	------------	------------	------------

Sumber : BPS Aceh Tengah

Dari Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa PDRB Kabupaten Aceh Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2015. PDRB terbesar berada pada sektor pertanian, kehutan dan perikanan yaitu sebesar Rp 2639688.80 pada tahun 2015. Sedangkan pada sektor Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial terkecil berada pada tahun 2013 yaitu Rp 388198.40. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan pada sektor Produk Domestik Regional Bruto yaitu sebesar Rp 5886498.69.

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Aceh Tengah berprofesi sebagai petani dan pekebun. Kabupaten Aceh Tengah menghasilkan salah satu jenis kopi arabika terbaik di dunia dengan luas lahan mencapai 48.300 hektar produksi per hektare sebanyak 720 kilogram. Salah satu potensi yang ada di Aceh Tengah yaitu kopi gayo merupakan varietas kopi arabika yang menjadi salah satu komoditi unggulan yang berasal dari Dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah, Indonesia. Kopi gayo telah mendapatkan *Fair Trade Certified* dari Organisasi *Internasional Fair Trade* pada tanggal 27 Mei 2010, kopi gayo menerima sertifikat IG (Indikasi Geografis) diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Indonesia. Kopi gayo cukup terkenal di dunia karena memiliki aroma dan kenikamatan yang khas dan jika di cupping atau di test rasa dan aroma di daerah gayo hampir memiliki cita rasa kopi yang ada di seluruh dunia.

Kabupaten Aceh Tengah memiliki berbagai macam objek wisata diantaranya wisata alam, wisata buatan dan wisata sejarah yang apabila dikelola akan dikembangkan dengan baik dan tepat maka akan menjadi daerah tujuan wisata

yang menarik untuk dikunjungi. Beberapa objek wisata di Kabupaten Aceh Tengah adalah Danau Laut Tawar, Pantan Terong, Taman Baru Linge Isak (berburu), Gua Loyang Koro, Loyang Pukes, Loyang Batu, Burni klieten dan Krueng Peusangan arus jeram.

Tabel 1.3
Jumlah Pengunjung Objek wisata di kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2012-2016

Tahun	Banyaknya Pengunjung
2012	25,880
2013	30,197
2014	33,891
2015	35,325
2016	36,249

Sumber : BPS Aceh Tengah

Dapat dilihat dari tabel 1.2 bahwa pada tahun 2016 dengan jumlah 33,891 orang dan pada tahun 2016 ini merupakan posisi dengan jumlah pengunjung paling tinggi kurung waktu 5 tahun terakhir. Namun pada tahun 2012 jumlah mengalami penurunan menjadi 25,880 orang. Pada tahun 2013 pengunjung mengalami kenaikan 30,197 orang. Pada tahun 2014 jumlah pengunjung sebanyak 33,891 dan pada tahun 2015 jumlah pengunjung mengalami penambahan sebanyak 36,249 orang. Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa pengunjung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Salah satu tolak ukur perkembangan pariwisata adalah pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan karena dengan peningkatan jumlah wisatawan yang datang secara langsung akan di ikuti oleh perkembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, pembagunan wilayah yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan bagi wisatawan.

Selain itu, dengan meningkatnya wisatawan yang berkunjung maka secara langsung akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan masyarakat objek wisata. Namun kendala yang dihadapi adalah jalan yang masih belum ada perbaikan dan kurang terawatnya objek wisata tersebut menjadikan daya tarik objek tersebut kurang diminati oleh masyarakat, sehingga perlu dilakukan kajian strategis untuk melakukan pengembangan disektor pariwisata yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan perlu dilakukan tinjauan geografi dengan pemetaan distribusi spasial/keruangan dan kewilayahan. Distribusi spasial obyek wisata merupakan aspek keruangan berupa lokasi persebaran obyek wisata baik berupa titik-titik, garis-garis atau areal-areal pada permukaan bumi yang ditunjukkan dalam bentuk peta (Yunus, 2010 : 4).

Tabel 1.4
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2016

Tahun	Target		Realisasi	
	PAD (Rp)	Pertumbuhan (%)	PAD (Rp)	Pertumbuhan (%)
2012	66.378.694.707,00	-	55.832.064.049,73	-
2013	73.668.285.472,00	10,98	76.870.466.782,32	37,68
2014	81.213.150.177,00	10,24	132.068.284.863,30	71,81
2015	87.473.986.935,00	7,71	157.886.839.912,16	19,55
2016	93.683.038.068,00	7,1	156.911.299.656,45	-0,70

Sumber :Badan Pengolahan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwasanya Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2012-2016. Pada tahun 2014 Pendapatan asli daerah mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 71,81 persen sedangkan

pada tahun 2015 mengalami kenaikan dari target 7,71 persen mengalami kenaikan sebesar 19,55 persen.

Setiap kabupaten memiliki perbedaan kontribusi masing-masing pos penerimaan dan pada Pendapatan Asli Daerah. Bidang Pariwisata mempunyai peran yang cukup penting dan strategi bagi pengembangan suatu daerah terlebih dengan adanya era otonomi daerah, dimana setiap daerah dituntut untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli suatu Daerah. Pengembangan bidang pariwisata merupakan suatu hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, mengingat banyak sekali keuntungan atau manfaat yang bisa diambil dari kegiatan pariwisata, antara lain dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat serta memperkenalkan potensi wisata yang ada di daerah tersebut kepada masyarakat umum dan yang tidak kalah penting adalah dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekarang ini lebih memungkinkan dan berpeluang besar untuk ditingkatkan dan dikembangkan, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar kepada PAD terutama Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai otonomi luas dan untuk sekaligus untuk meningkatkan kualitas layanan Daerah. Sebagaimana telah disebutkan dalam penjelasan UU Nomor 34 Tahun 1997 yaitu, Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan Retribusi yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Tabel 1.5
Pendapatan Realisasi Retribusi daerah
di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2016

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2012	13.523.579.200	6.759.191.752	50,0
2013	15.256.042.000	7.197.026.089	47,2
2014	13.831.041.500	9.998.022.201	72,3
2015	12.083.030.500	7.594.647.612	62,9
2016	12.068.030.500	5.439.496.085	45,1

Sumber : DPKKD kab Aceh Tengah 2013

Dari data diatas dapat diketahui bahwa kontribusi terbesar selama 5 tahun terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp 9.998.022.201, yaitu 72,3 persen hal ini disebabkan karena salah satu jenis penerimaan retribusi daerah yang dupungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Sedangkan kontribusi terendahnya terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 5.439.496.085 atau 45,1 persen. Karena pada tahun 2016 pendapatan realisasi yang diperoleh mengalami penurunan hal ini disebabkan terjadi karena salah satunya yaitu retribusi jasa umum mulai dari pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi pasar grosir atau pertokoan dan lainnya. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai hal ini.

Dari penjeasan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang **Analisis Peningkatan Retribusi Daerah Melalui Pengembangan obyek Wisata di Kabupaten Aceh Tengah.**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Peningkatan Retribusi daerah dan di Kabupaten Aceh Tengah mengalami penurunan setiap tahunnya tetapi masih relatif kecil untuk meningkatkan PAD
2. Jumlah kunjungan wisata dari tahun 2012-2016 mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun relatif sedikit
3. Masih banyaknya potensi wisata di Kabupaten Aceh Tengah yang belum di kembangkan

1.3 Batasan Masalah

Dari hasil uraian identifikasi masalah sebelumnya maka peneliti membatasi masalah penelitiannya pada retribusi daerah, pendapatan asli daerah dan jumlah pengunjung yang berada di Kabupaten Aceh Tengah.

1.4 Rumusan masalah

1. Bagaimanakah perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah?
2. Bagaimana perkembangan retribusi daerah selama pengembangan objek wisata di Kabupaten Aceh Tengah
3. Bagaimanakah strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan objek pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah?

1.5 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Untuk menganalisis perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah

1. Untuk menganalisis Bagaimana perkembangan retribusi daerah selama pengembangan objek wisata di Kabupaten Aceh Tengah
2. Untuk menganalisis strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan objek pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah

1.6 Manfaat penelitian

Menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan memperoleh pengetahuan tentang tentang potensi objek wisata di Kabupaten Aceh Tengah dan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pengembangan obyek wisata

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Keuangan Negara

Dalam UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Untuk memahami pengertian di atas, maka keuangan negara dapat dilihat dari berbagai pendekatan berikut ini, yaitu

1. Dari sisi obyek, Keuangan Negara merupakan semua hak dan kewajiban negara dalam menyelenggarakan fungsi pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, misalnya; kebijakan pemberian ataupun pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kebijakan pemungutan pajak terhadap rakyat, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, misalnya: dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan kendaraan dinas pejabat negara atau pemerintah.
2. Dari sisi subyek, Keuangan Negara merupakan seluruh obyek keuangan negara yang dimiliki negara, dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat,

Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara, misalnya: uang yang ada di kas negara dan barang-barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

3. Dari sisi proses, Keuangan Negara merupakan saluran rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek keuangan negara mulai dari perumusan kebijakan, pendapatan regulasi, penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) sampai dengan pertanggung jawaban APBN/APBD.
4. Dari sisi tujuan, keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan penguasaan obyek keuangan negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara.

Sedangkan pada penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, penguasaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, penguasaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), yayasan badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyetarakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Berdasarkan pengertian Keuangan Negara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa keuangan tidak hanya terbatas pada uang semata, tetapi segala

termasuk segala hak dan kewajiban negara (dalam bentuk apapun) yang dapat dijadikan milik negara, baik yang berada dalam penguasaan pemerintah maupun penguasaan pihak lain selain pemerintah.

Berdasarkan kedua pengertian keuangan negara tersebut dapat disimpulkan bahwa keuangan negara tidak hanya terbatas pada uang semata, tetapi termasuk segala hak dan kewajiban negara (dalam bentuk apapun) yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara, baik yang berada dalam penguasaan pemerintah maupun penguasaan pihak lain selain pemerintah.

A. Sumber Pendapatan Daerah

Dalam pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 beserta penyesuaian menyatakan bahwa daerah Indonesia terbagi dalam daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administratif. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab di daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya manusia yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan Pemerintah Pusat dan Daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan asli daerah yang sah.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yakni dan yang berasal dari pusat yang bertujuan menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan atarara Pemerintah Daerah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Sedangkan DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabipaten/Kota. Untuk besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Dana alokasi Umun dialokasi dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat didaerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.

Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus daerah. disamping itu untuk menanggulangi keadaan mendesak seperti bencana alam, kepada daerah dapat dialokasikan Dana Darurat.

c. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah adalah transasaksi yang mengakibatkan pemerintah daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga pemerintah daerah tersebut dibebani kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali (PP No. 54 Tahun 2005). Menurut Pasal 169-171 UU No. 32 tahun 2004, salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah adalah dengan melakukan pembiayaan daerah memlalui berbagai alternatif

sumber pembiayaan baru, misalnya pinjaman kepada pihak dalam negeri, luar negeri, pihak swasta maupun kepada masyarakat melalui obligasi.

d. Lain-lain penerimaan yang sah

Penerimaan lain yang sah terdiri dari hibah dan dan darurat. Hibah adalah penerimaan daerah berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga Internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan. Dana darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang terkena bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan krisis solvabilitas.

2.1.2 Target Pendapatan Daerah

Targer pendapatan daerah adalah perkiraan hasil perhitungan pendapatan daerah secara minimal dicapai dalam satu tahun anggaran. Agar perkiraan pendapatan daerah dapat di pertanggung jawabkan, di dalam penyusunannya memerlukan perhintungan terhadap faktor-faktor sebagai berikut (Soelarso, 1998):

1. Realisasi penerimaan pendapatan daerah dari tahun anggaran yang lalu dengan memperlihatkan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut serta faktor –faktor penghambatnya.
2. Kemungkinan pencairan jumlah tunggukan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih minimal 35 persen dari tunggukan sampai tahun lalu.
3. Data potensi objek pajak dan estimasi perkembangan dan perkiraan penerimaan dari penetapan tahun berjalan minimal 80 persen dari penetapan.
4. Kemungkinan adanya perubahan/penyesuaian, keanekaragaman tarif dan penyempurnaan sistem pemungutan.

5. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib pajak/bayar.
6. Kebijakan dibidang ekonomi dan moneter.
7. Perkembangan tersedianya prasarana dan sarana serta biaya pungutan.

Adapun prosedur dalam penyusunan target pendapatan daerah beradadalam waktu satu bulan RAPBN disusun, maka setiap dinas/instansipenghasilan PAD harus sudah menyiapkan Rencana Target Penerimaan PAD kepada Dipenda, dengan tembusan kepada : (a) Biro Keuangan, (b) Bappeda, (c) Inpektorat Wilayah Provinsi/Kabupaten/ Kota.

Adapun prosedur dalam penyusunan target pendapatan daerah berada dalam waktu satu bulam sebulum RAPBD disusu, maka setiap dinas/instansi penghasilan PAD harus sudah menyiapkan Rencana Target Penerimaan PAD pada dipenda, dengan tembusan kepada : (a) Biro Keuangan, (b)Bappeda, (c) Inpektorat Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota.

2.1.3 Kriteria Sumber Penerimaan Daerah

Kriteria yang harus dipenuhi dari suatu penerimaan daerah adalah:

1. kecukupan dan Elastitas

sumber pendapatan daerah harus menghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang dikeluarkan. Jika suatu sumber penerimaan sepetri retribusi hanya mengasilkan presentase yang kecil diatas anggaran yang dikeluarkannya, akan banyak menimbulkan kerugian yaitu ongkos pungutan yang menjadi besar, upaya admitrasi terbagi-bagi, pembebanan sulit dicapai secara adil dan kesan yang negatif terhadap kemampuan keuangan akan timbul.

2. Pemerataan

Suatu sumber penerimaan ditanggung oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan konsep keadilan.

3. Kelayakan Admitrasi

Suatu sumber penerimaan haruslah didukung dengan admitrasi yang memadai yang akan memberikan kemudahan-kemudahan di dalam melaukukan perhitungan, pengawasan dan pelayanan pungutan. (Davey, 2005)

2.1.4 Retribusi Daerah

Retribusi merupakan pembayaran atau jasa pelayanan umum yang dipungut langsung oleh pemerintah kepada wajib retribusi yang disertai dengan kontraprestasi langsung yang diberikan oleh pemerintah terhadap wajib retribusi. Retribusi bersifat sukarela. Setiap orang memiliki pilihan untuk tidak membayar retribusi. Jika seseorang sudah membayar retribusi maka pemerintah daerah harus memberikan semacam kontraprestasi langsung, misalnya: seseorang telah membayar biaya retribusi izin usaha penyediaan jasa makanan dan minuman. Maka pemerintah daerah harus menerbitkan izin tersebut jika seseorang telah memenuhi syarat yang diminta peraturan daerah yang bersangkutan. Retribusi bertujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun

2002 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Pelaksanaan, retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum

- a. objek retribusi jasa umum yakni pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
- b. Jenis-jenis retribusi jasa umum yakni pelayanan kesehatan, persampahan/kebersihan, penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pariwisata, pungujian kendaraan bermotor, pemisahan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta dan pengujian pengujian kapal perikanan.
- c. Subjek retribusi jasa umum yakni orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

2. Retribusi Jasa Usaha

- a. Objek retribusi jasa usaha yakni pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan prinsip komersil.
- b. Jenis-jenis uasaha yakni pemakaian kekayaan daerah, pariwisata grosir,pertokoan, tempat pelelangan, terminal, tempat khusus parkir, tempat penginapan, penyedotas kaskus, rumah pemotongan hewan, pelayanan pelabuhan kapal, tempat rekreasi dan olahraga, penyeberangan diatas air, pengolahan limbah cair, dan penjualan produksi daerah.

- c. Subjek retribusi jasa usaha yakni orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan jasa usaha bersangkutan.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

- a. Objek perizinan retribusi tertentu yakni kegiatan tertentu yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengadil, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- b. Jenis jenis retribusi perizinan tertentu yakni izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin gangguan, dan izin trayek.
- c. Subjek perizinan tertentu yakni pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu di Pemerintah Daerah.

Jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, atau retribusi perizinan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan kriteria :

1. Retribusi Jasa Umum

- a. Retribusi jasa umum tidak bersifat pajak tidak bersifat retribusi jasa usaha.
- b. Jasa merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

- c. Jasa manfaat khusus bagi orang/ pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
 - d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
 - e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
 - f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, sebagai sumber pendapatan daerah yang potensial.
 - g. Pemungutan retribusi sebagai penyediaan jasa pelayanan yang lebih baik.
2. Retribusi Jasa Usaha
- a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum.
 - b. Jasa yang bersangkutan merupakan jasa yang bersifat komersil yang seyogyanya disediakan oleh swasta tetapi belum memadai dan dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan penuh oleh pemerintah daerah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu
- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka azas desentralisasi.
 - b. Perizinan tersebut digunakan guna melindungi kepentingan umum. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk mengulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar, sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

2.1.5 Ciri-ciri Retribusi Daerah

Ciri-ciri yang terdapat dalam retribusi daerah (Musgrave, 1993) adalah sebagai berikut :

1. Retribusi dikenakan kepada siapa saja menggunakan jasa yang diberikan oleh daerah.
2. Adanya balas jasa yang langsung dapat diterima oleh pembayaran retribusi.
3. Bagi yang telah menikmati jasa/tidak membayar retribusi dapat dikenakan sanksi atau upaya memaksa.
4. Retribusi dipungut oleh daerah berdasarkan UU dan peraturan pelaksanaannya.

Menurut Josef Riwu Kaho (2003) menambahkan bahwa retribusi sebagai sumber pendapatan daerah dapat dilihat dari segi : (1) kecukupan dan elastisitas, (2) keadilan, (3) admitrasi. Dari segi kecukupan dan elastisitasnya, maka retribusi pada dasarnya memiliki sifat yang kurang responsif terhadap perubahan ekonomi secara makro. Hal ini disebabkan karena hampir semua penerapan retribusi hanya didasarkan pada tarif per unit pelayanan yang besarnya relatif tetap. Dari segi keadilan penetapan retribusi biasanya cenderung bersifat regresif, tidak membedakan pengenaan tarif pada orang kaya dan miskin dimana dipukul samarata. Misalnya, pengenaan retribusi air minum , telepon dan sebagainya. Dari segi admitrasi, salah satu kelemahan retribusi adalah sulit menentukan target yang diperoleh. Hal ini disebabkan karena penerimaan retribusi sangat tergantung pada jumlah jasa yang dikonsumsi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka karakteristik retribusi adalah: (1) retribusi daerah yang berlaku umum, (2) dalam retribusi, hubungan antara prestasi yang dilakukan (dalam bentuk pembayaran) dengan kontraprestasi itu bersifat langsung. Dimana pembayaran retribusi justru menghendaki adanya jasa timbal balik langsung dari pemerintah; contohnya pembayaran air minum, telepon, listrik, pariwisata dan sebagainya, (3) hasil penerimaan retribusi digunakan untuk pelayanan umum berkait dengan retribusi yang bersangkutan, (4) pelaksanaan retribusi mudah ditetapkan dalam hal pengenaan tarif dan pemungutan serta bersifat memaksa.

Faktor-faktor Penerimaan Retribusi Daerah

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya penerimaan retribusi daerah seperti yang dikemukakan oleh R. Soerdargo (1962) adalah sebagai berikut :

a. Faktor Jumlah Subjek Rtribusi Daerah

Sesuai dengan sifatnya maka retribusi daerah hanya dikenakan kepada mereka yang memanfaatkan jasa pelayanan pemerintah daerah. karena semakin banyak orang yang memanfaatkan jasa pelayanan pemerintah daerah, maka penerimaan daerah dari retribusi juga semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan ekonomi daerah tersebut.

b. Faktor Jenis dan Jumlah Retribusi Daerah

Dengan perkembangan ekonomi yang semakin baik dari suatu daerah akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan jasa pelayanan kepada warganya. Semakin banyak jasa pelayanan yang

ditawarkan kepada masyarakat akan semakin besar pula pungutan yang ditarik dari warga masyarakat.

c. Faktor Tarif Retribusi Daerah

Besarnya tarif retribusi daerah yang diterapkan sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi daerah. Jika tarif retribusi daerah yang dikenakan kepada masyarakat tinggi, maka penerimaan retribusi akan semakin meningkat.

d. Faktor Efektivitas Pungutan Retribusi Daerah

Dalam melaksanakan pungutan retribusi daerah, tidak dapat dipisahkan dari kemampuan aparat pelaksana pungutan. Semakin tinggi kemampuan pelaksana pungutan (SDM) maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas pungutan yang pada akhirnya akan menaikkan jumlah penerimaan daerah.

Pungutan retribusi langsung atas konsumen dikenakan karena satu atau lebih pertimbangan sebagai berikut,

- a. Apakah pelayanan tersebut merupakan barang-barang umum atau pribadi, mungkin pelayanan tersebut dapat disediakan karena setiap orang dan oleh karena itu tidak wajar untuk membebankan biaya-biaya tersebut kepada pembayar-pembayar pajak yang tidak mendapatkan jasa/ barang tersebut.
- b. Suatu jasa dapat melibatkan suatu sumber yang langka atau mahal dan perlunya disiplin konsumsi masyarakat.
- c. Mungkin ada bermacam-macam variasi didalam konsumsi individu, yang berkaitan setidak-tidaknya untuk memilih daripada memerlukan.
- d. Jasa-jasa dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan mencari keuntungan disamping memuaskan kebutuhan-kebutuhan individu dalam negeri.

- e. Retribusi dapat menguji arah dan skala dari permintaan masyarakat akan jasa, dimana kebutuhan pokok atau bentuk-bentuk dan standar-standar dari penyediaan tidak dapat dikenakan dengan tegas ditemukan.

Efektifitas Retribusi

Menurut Devas CN (1989), terdapat tiga tolak ukur dari penerimaan anggaran yang berkaitan dengan pajak/retribusi yaitu terdiri dari hal-hal seperti : upaya pajak/retribusi (*tax/charge effort*), hasil guna (*effectiveness*), daya guna (*efficiency*). Berikut merupakan penjelasan tolak ukur tersebut :

1. Upaya pajak /retribusi (*tax/charge effort*)

Upaya pajak/retribusi adalah hasil dari suatu sistem pajak/retribusi, teori ini dikemukakan oleh Nick Devas yang berbeda dengan teori tax effort dalam ilmu perpajakan, dimana dalam teori ini berkaitan dengan peraturan maupun undang-undang yang mengatur pajak/retribusi tersebut. Sehingga upaya pajak/retribusi lebih banyak mengangkat sistem pajak/retribusi secara keseluruhan yang lebih luas dari pada menyangkut administrasi penerimaan pajak/retribusi.

2. Hasil guna (*effectiveness*)

Hasil guna menyangkut semua tahapan administrasi penerimaan pajak/retribusi, yaitu menentukan wajib pajak/retribusi, menetapkan nilai kena pajak/retribusi, menetapkan tarif pajak/retribusi, memungut pajak, menegakan sistem pajak/retribusi, dan membuka penerimaan pajak/retribusi. Ada beberapa faktor yang mengancam hasil guna, antara lain menghindar pajak/retribusi kolusi antara petugas pajak/retribusi dan wajib

pajak/retribusi, untuk mengurangi pajak/retribusi terhutang dan penipuan oleh petugas pajak/retribusi.

Efektivitas pada umumnya digunakan sebagai ukuran keberhasilan perangkat usaha dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas pemungutan pajak/retribusi dalam hal ini merupakan gambaran kemampuan dari unit organisasi pengelola retribusi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam studi ini, sasaran akhir utama retribusi tersebut adalah penerimaan retribusi yang direncanakan. Akan tetapi, untuk dapat memungut retribusi tersebut dibutuhkan berbagai kegiatan/usaha. Untuk dapat mengadakan studi dan analisis yang mendetail tentang efektivitas tersebut, model yang digunakan harus disesuaikan dengan tugas dan fungsi satuan-satuan kegiatan/subunit organisasi tersebut. Secara makro, efektivitas pemungutan retribusi dapat diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan dengan sasaran penerimaan yang direncanakan/target. Secara sederhana efektivitas pemungutan yang diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi}}{\text{Target penerimaan retribusi}} \times 100\%$$

Semakin besar efektivitas menunjukkan semakin efektif pemungutan retribusi dihubungkan dengan sasaran yang akan diperoleh

2.1.6 Pariwisata

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut. Pariwisata merupakan sesuatu kegiatan yang secara langsung menyentuh

dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Bahkan pariwisata dikatakan mempunyai efek yang luar biasa, yang mampu membuat masyarakat setempat mengalami metamorphose dalam berbagai aspek nya (L. Gede Pitana,2005).

Pariwisata dalam arti modern adalah fenomena zaman sekarang yang didasarkan pada kebutuhan akan kesehatan dan pengantian hawa, penilaian dalam menumbuhkan cinta pada alam, kesenangan dan kenikmatan alam semesta pada khususnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan bangsa dan kelas dalam masyarakat manusia sebagai penghasil perkembangan perniagaan, industri, perdagangan dan adanya semakin sempurna alat-alat pengangkutan, (Nyoman S.Pendit 1994). Pada hakikatnya berpariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan ekonomi, sosial, agama, kesehatan, mampu kepentingan lain sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar.

Istilah pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang diluar tempat tinggalnya karena suatu alasan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjalanan wisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu. Dapat juga karena kepentingan yang berhubungan dengan olahraga untuk kesehatan, konvensi, keagamaan , dan keperluan usaha lainnya.

Institute of Tourism in Britain (sekarang *Tourism Society in Britain*) ditahun 1976 merumuskan : “ pariwisata adalah kepergian orang-orang sementara dalam jangka waktu pendek ke tempat tujuan diluar tempat tinggal dan pekerjaan sehari-harinya serta kegiatan-kegiatan mereka selama berada di tempat-tempat tujuan tersebut ; ini mencakup kepergian untuk berbagai maksud, termasuk kunjungan seharian atau darmawisata” (Pendi, 2006). Dalam Undang-Undang RI Nomor 10 tentang kepariwisataan, yang dimaksud dengan :

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- b. Wisatawan adalah orang melakukan wisata.
- c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
- d. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta layanan yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah pengusaha.
- e. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata.

- f. Daerah Tujuan Pariwisata (Destinasi Pariwisata) adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

2.1.7 Pengertian Obyek Wisata

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990, obyek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata. Jadi obyek wisata adalah perwujudan daripada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Dalam membangun obyek dan daya tarik wisata tersebut harus diperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat, sosial budaya setempat, nilai-nilai agama, adat istiadat, lingkungan hidup, beserta obyek dan daya tarik wisata itu sendiri. Pembangunan obyek dan daya tarik wisata dapat dilakukan oleh pemerintah, badan usaha dan perseorangan. Penggolongan jenis obyek wisata akan terlihat dari ciri khas yang ditonjolkan oleh tiap-tiap obyek wisata. Obyek wisata dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

- a. Obyek wisata alam, misalnya : pantai, laut, gunung berapi, danau, sungai, fauna (langka), flora (langka), kawasan lindung, cagar alam, pemandangan alam, dan lain-lain.
- b. Obyek wisata budaya, misalnya : Upacara kelahiran, tari-tari(tradisional), musik (tradisional), pakaian adat, perkawinan adat, upacara turun ke sawah, upacara panen, cagar budaya, bangunan bersejarah, peninggalan tradisional, festival budaya, kain tenun (tradisional), tekstil lokal, pertunjukan (tradisional), adat istiadat lokal, museum, dan lain-lain.

- c. Obyek wisata buatan, misalnya : sarana dan fasilitas olahraga, permainan(layangan), hiburan (lawak/akrobatik dan sulap), ketangkasan (naik kuda), taman rekreasi, taman nasional, pusat-pusat perbelanjaan dan lain-lain. (Andi Mappi S, 2001: 30-33)

Ditinjau dari segi ekonomi pemberian klasifikasi tentang jenis pariwisata dianggap penting karena dengan cara itu dapat di tentukan berapa penghasilan devisa yang diterima dari suatu pariwisata yang dikembangkan disuatu tempat atau daerah tertentu. Adapun jenis wisata yang telah dikenal dimasa ini antara lain menurut (Pendit, N. S 1994)

1. Wisata Budaya

Wisata Budaya adalah perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lain, mempelajari keadaan rakyat dan kebiasaan adat istiadat, budaya dan seni mereka.

2. Wisata Konvensi

Wisata konvensi adalah wisata yang menyediakan fasilitas bangunan dengan ruang-ruang tempat bersidang bagi peserta konvensi, atau pertemuan lainnya yang bersifat nasional maupun internasional.

3. Wisata Sosial

Wisata sosial adalah perorganisasian suatu perjalanan murah serta mudah untuk memberikan kesempatan kepada golongan masyarakat ekonomi lemah untuk mengadakan perjalanan seperti misalnya kaum buruh, pemuda, pelajar atau mahasiswa, petani dan sebagainya.

4. Wisata Cagar Alam

Wisata Cagar Alam adalah wisata yang diselenggarakan agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan jalan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah pengunungan dan sebagainya yang pelestariannya dilindungi oleh Undang-undang

5. Wisata Bulan Madu

Wisata Bulan Madu adalah suatu penyelenggaraan perjalanan bagi pasangan-pasangan pengantin baru yang sedang berbulan madu, dengan fasilitas-fasilitas khusus, tersendiri demi kenikmatan perjalanan dan kunjunga mereka.

Pengolongan obyek wisata menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990, bahwa obyek wisata dan daya tarik wisata terdiri dari :

1. Obyek dan daya tarik ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna.
2. Obyek dan daya tarik hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan sejarah, wisata argo, wisata tirta, wisata pertualangan alam, taman rekreasi dan taman hiburan.

2.1.8 Pembagunan Pariwisata

Menurut peraturan pemerintah tentang rencana induk pembagunan kepariwisataan tahun 2010-2025, dalam peraturan pemerintah ini yang di maksud dengan :

- a. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang bersifat multidimensi yang muncul sebagai wujud

kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

- b. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang didalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengadilannya, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.

Jadi disimpulkan, pembangunan pariwisata adalah suatu proses perubahan untuk menciptakan nilai tambah dalam segala aspek bidang pariwisata, mulai dari sarana prasarana, Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW), dan aspek-aspek lainnya.

Tujuan pembangunan kepariwisataan nasional adalah :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata.
- b. Mengkomunikasikan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab.
- c. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional.
- d. Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mengsinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Pembangunan pariwisata meliputi keadaan sosial dan memiliki dampak terhadap sosial ekonomim, adapun dampak sosial ekonomi yaitu :

- a) Kondisi Sosial Ekonomi

Keadaan sosial ekonomi setiap orang itu berbeda-beda dan bertingkat, ada yang keadaan sosial ekonominya tinggi, sedang, dan rendah. Menurut (Seorjono Soekanto, 2001) sosial ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajiban dalam berhubungan dengan sumber daya. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan pengertian keadaan sosial ekonomi dalam penelitian ini adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, kepemilikan kekayaan atau fasilitas serta jenis tempat tinggal.

- b) Dampak Terhadap Sosial Ekonomi
 - a. Dampak terhadap penerimaan devisa
 - b. Dampak terhadap pendapatan masyarakat
 - c. Dampak terhadap kesempatan kerja
 - d. Dampak terhadap harga-harga
 - e. Dampak terhadap distribusi manfaat/keuntungan
 - f. Dampak terhadap kepemilikan dan control
 - g. Dampak terhadap pembagunaan pada umumnya
 - h. Dampak terhadap pendapatan pemerintah

2.1.9 Konsep Pembagunan Daya Tarik Wisata

Pengembangan kepariwisataan dapat diidentifikasi secara khusus sebagai upaya penyediaan atau peningkatan fasilitas dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan (Santoso, 2006:23).

Menurut Yoeti (2005), berkembangnya suatu obyek wisata tergantung pada proses produksi industri pariwisata yang meliputi daya tarik wisata, kemudahan perjalanan, sarana dan fasilitas serta promosi. Negara yang sadar akan pengembangan pariwisata berdasarkan Direktorat Jenderal pariwisata biasa mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Perencanaan pengembangan pariwisata harus menyeluruh sehingga seluruh bagi pengembangan pariwisata diperhitungkan dengan memperhatikan pola perhitungan untung rugi apabila dibandingkan dengan pembagunan sektor lain.
2. Pengembangan pariwisata harus di integrasikan ke dalam pola dan program pembagunaan semasa ekonomi, fisik dan sosial suatu Negara.
3. Pengembangan pariwisata harus diarahkan sedemikian rupa sehingga membawakan kesejahteraan ekonomi yang tersebar luas dalam masyarakat.
4. Pengembangan pariwisata harus sadar lingkungan sehingga pengembangan yang mencerminkan ciri-ciri khas budaya dan lingkungan alam suatu Negara, bukanya justru merusak lingkungan alam dan budaya yang khas itu.
5. Pengembangan pariwisata harus diarahkan sedemikian rupa sehingga pertentangan sosial dapat dicegah seminimal mungkin dan dapat menimbulkan perubahan-perubahan sosial yang positif.
6. Penentuan tata cara pelaksanaanya harus disusun sejelas-jelasnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang masah sesuai kemampuan.
7. Pencatatan (monitoring) secara terus-menerus mengenai pengaruh pariwisata terhadap suatu masyarakat dan lingkungan sehingga merupaka perubahan yang

baik meluruskan kembali akibat perkembangan pariwisata yang merugikan sehingga merupakan sarana pengendalian pengembangan yang terarah.

Pengembangan potensi daya tarik / atraksi wilayah meliputi daya tarik alami yang bersifat melekat (inherent) dengan keberadaan obyek wisata alam tersebut. Selain daya tarik alami, suatu obyek wisata memiliki daya tarik buatan manusia (*man made attraction*).

Unsur-unsur pengembangan pariwisata meliputi :

1. Atraksi

Atraksi atau daya tarik dapat timbul dari keadaan alam (keindahan panorama, flora, fauna, sifat kaks, perairan, laut, danau), obyek buatan manusia (museum, katedral, mesjid, makam kuno, dan sebagainya), pariwisata budaya (kesenian, adat-istiadat, makanan dan sebagainya).

2. Transportasi

Perkembangan transportasi berpengaruh atas arus wisatawan dan juga perkembangan akomodasi. Disamping itu perkembangan teknologi transportasi juga berpengaruh atas fleksibilitas arah perjalanan, jika angkutan dengan kereta api bersifat liner, tidak banyak cabang atau kelokannya, dengan mobil arah perjalanan akan menjadi lebih bervariasi. Demikian pula dengan angkutan pesawat terbang yang dapat melintasi berbagai rintangan alam (dan waktu yang lebih singkat)

3. Akomodasi

Tempat menginap dapat dibedakan antara untuk dibagian keperluan umum (hotel, motel, tempat pondokan, tempat berkemah waktu liburan)

dan yang diadakan khusus perorangan untuk menampung atau menginap keluarga, kenalan atau anggota perkumpulan tertentu terbatas.

4. Fasilitas pelayanan

Penyediaan fasilitas dan pelayanan makin berkembang dan bervariasi sejalan dengan perkembangan arus wisatawan. Perkembangan pertokoan dan jasa pelayanan pada tempat wisata dimulai dengan adanya pelayanan jasa kebutuhan sehari-hari (penjualan makanan, warung minuman/jajanan), kemudian jasa-jasa perdagangan (Pramuniaga/pembantu penjualan, tukang-tukang atau jasa pelayanan lain), selanjutnya jasa untuk kenyamanan dan kesenangan (toko pakaian, toko prabot, rumah tangga), lalu jasa yang menyangkut keamanan dan keselamatan (dokter, apotek, polisi, pemadam kebakaran), dan pada akhirnya perkembangan lebih lanjut memnyangkut juga jasa penjualan barang mewah.

5. Infrastruktur

Infrastruktur yang memadai diperlukan untuk mendukung jasa pelayanan dan fasilitas pendukung. Pembangunan infrastruktur secara tidak langsung juga memberi manfaat (dapat digunakan) bagi penduduk setempat disamping mendukung pengembangan pariwisata. Hal ini menyangkut tidak saja pembangunan infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, jalan kereta api) tetapi juga penyediaan saluran air minum, penerangan listrik, dan juga saluran pembuangan limbah.

2.1.10 Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata tidak lepas dari perkembangan politik, ekonomi, sosial dan pengembangan disektor lainnya, maka didalam pengembangan

pariwisata dibutuhkan perencanaan terlebih dahulu. Dari pemikiran tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan adalah salah satu proses yang terjadi secara terus-menerus, untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya terhadap ancaman yang ada untuk dapat berkembang dalam mencapai tujuan individu dalam organisasi dan tujuan organisasi secara keseluruhan

Dalam pembagunan pariwisata dibutuhkan perencanaan terlebih dahulu. beberapa prinsip perencanaan pariwisata, diantaranya :

- a. Perencanaan harus memiliki suatu kesatuan dengan pembagunan regional atau nasional dari pembagunaan perekonomian suatu negara.
- b. Perencanaan pengembangan kepariwisataan menghendaki pendekatan terpadu dengan sektor-sektor lainnya, terutama sektor pertanian, jasa, perdagangan, serta sektor transportasi.
- c. Perencanaan suatu daerah tujuan pariwisata harus berdasarkan suatu studi yang khusus dibuat untuk daerah tersebut dan dengan memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan alam serta budaya di daerah yang bersangkutan.
- d. Perencanaan fisik suatu daerah untuk tujuan pariwisata tidak hanya memperhatikan segi admistrasi saja tetapi juga di dasarkan atas penelitian yang sesuai dengan lingkungan alam sekitar, faktor geografis dan teknologi dari daerah yang bersangkutan.

Dalam melakukan pengembangan kepariwisataan, perlu dilakukan penekanan terhadap organisasi pariwisata yang ada (baik pemerintah, masyarakat, dan swasta) serta pihak-pihak terkait guna mendukung kelangsungan pembagunan pariwisata di

daerah tersebut (Dermantoto, 2008). Oleh karna itu, dalam perencanaan kepariwisataan dibutuhkan perumusan yang cermat dan diambil kata sepakat, apa yang menjadi kewajiban pemerintah dan mana yang menjadi tanggung jawab pihak swasta, sehingga dalam pengembangan selajutnya tidak terjadi tumpah tindih yang dapat menimbulkan perbedaan antara suatu pihak dengan pihak yang lain.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian/ Tahun	Judul	Variabel penelitian	Hasil penelitian
1.	Wilda R. Payopo dan Jani Effendi, 2008	Stategi pengemban gan situs pariwisata pantai nestapa desa Suli Kab. Maluku Tengah	Variabel: 1. Pendapatan 2. Travel cost 3. Waktu berkunjung 4. Pekerjaan 5. Pendidkan 6. Umur 7. Daya tarikwisata Metode : 1. Analisis	Dari tujuan faktor yang diduga berpengaruh ternyata faktor pendapatan. Biaya .perjalanan (travel cost), waktu berkunjung, umur dan daya traik wisata berpengaruh secara signifikan terhadap frekuensi kunjungan kawasan wisata pantai

			<p>Regresi Berganda</p> <p>2. Analisis SWOT</p>	<p>Natsepa, di peroleh nilai uji t hitung lebih besar dari t hitung pada tingkat kepercayaan 95%, sedangkan faktor pekerjaan dan pendidikan tingkat terlalu berpengaruh karena keputusan untuk berkunjung ke obyek wisata ini lebih kepada jarak tempuh yang cukup dekat dengan biaya perjalanan yang relative murah.</p> <p>Berdasarkan analisis SWOT, strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan kawasan wisata pantai Natsepa adalah :</p> <p>1. Pengembangan</p>
--	--	--	---	--

				<p>objek wisata sesuai dengan kebijakan pemerintah dan konsep rencana induk kepariwisataan.</p> <p>2. Peningkatan kualitas objek wisata</p> <p>3. Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana wisata dan sarana penunjang wisata.</p>
2	M. Prihatna Sobari, dkk Tahun 2007	Analisi permintaan dan strategi pengembangan wisatah bahari Kalianda Resort	Variabel : 1. Tingkat kunjungan 2. Waktu berkala 3. Biaya perjalanan	1. Presepsi dan preferensi pengunjung menyatakan bahwa pantai kalianda resort sangat nyaman dan sangat indah, hal ini dilihat dari tingkat pengunjung lebih

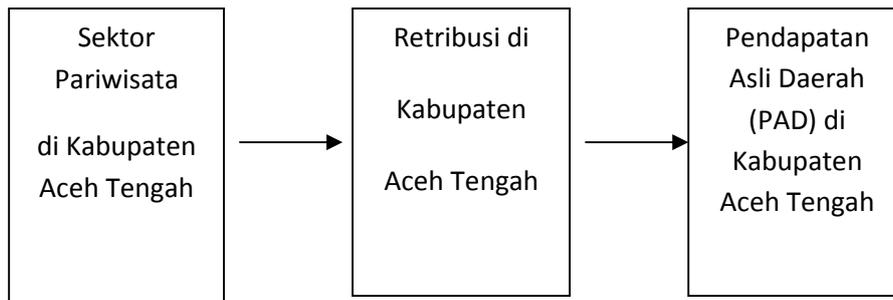
				<p>dari 80%</p> <p>2. Hasil pendugaan tingkat kunjungan wisatawan tahun 2004 ke pantai kalianda resort adalah 65,780 orang dan elastisitas permintaan rekreasi yang didapat dari persamaan permintaan rekreasi sebesar 2,4759 dari hasil perhitungan uji f</p> <p>1. Analisis SWOT menghasilkan tiga starategi alternatif tang menjadi prioritas utama, menambah fasilitas sarana dan prasarana penunjang, serta</p>
--	--	--	--	--

				<p>gencar melakukan promosi yang bekerjasama dengan pemerintah</p> <p>2. Mengantisipasi persaingan antara obyek wisata dengan meningkatkan kualitas , kuantita dari sumberdaya alam dan sumber daya manusia.</p> <p>3. Memperbaiki citra objek wisata untuk meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan di saat situasi di indonesia mulai stabil.</p>
--	--	--	--	---

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual dalam konsep ini akan disajikan sebagai berikut

Gambar 2.1 kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan penelitian deskriptif Menurut Sugiyono (2005 : 21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Analisi deskriptif dilakukan dengan memaparkan gambaran implementasi pengembangan sektor pariwisata dari data-data yang telah diperoleh pada penelitian.

3.2 Defenisi Oprasional

Defenisi oprasional adalah suatu defenisi yang memberikan penjelasan atas suatu variabel dalam bentuk yang dapat diukur. Defenisi oprasional memberikan informasi yang diperlukan untuk mengukur variabel yang teliti. Berikut defenisi oprasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini :

Variabel	Defenisi oprasional	Sumber Data
Pariwisata	Pariwisata merupakan melakukan perjalanan	www.bps.go.id

	atau persingahan sementara dari tempat tinggalnya ke suatu atau beberapa tempat tujuan di luar lingkungan tempat tinggalnya.	
Hotel	Suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum	Dinas Pariwisata dan Olahraga
Restoran	Tempat makan/minum dengan bangunan permanen di mana makanan yang disajikan harus di proses/dimasak terlebih dahulu.	Dinas Pariwisata dan Olahraga
Fasilitas Pariwisata	Semua jenis sarana dan yang secara khusus ditunjukkan untuk mendukung kemudahan,	Dinas Pariwisata dan Olahraga

	kenyamanan , dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata	
Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah , bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas, dan penerimaan dari lain-lain.	www.bps.go.id

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Adapun penelitian dilakukan di Provinsi Aceh di Kabupaten Aceh Tengah

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan Januari 2019 hingga ferbuari 2019

3.4 Jenis Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang sudah dipublikasikan yaitu data dalam bentuk angka-angka dengan kurun waktu dari tahun 2012-2016. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, jurnal, literatur, dan akses dari internet terkait.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun data-data sekunder, yaitu jenis data yang diperoleh dari dokumentasi. Data berkala yang digunakan dengan kurun waktu 2012-2016. Sehingga hasil penelitian ini merupakan hasil penggunaan data selama periode waktu tersebut. Tahun 2012 sebagai tahun dasar dan tahun 2016 sebagai tahun akhir penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Dimana data tersebut dinyatakan dalam bentuk kategori, dan juga di deskripsikan dalam bentuk persentase, tabel, grafik maupun narasi untuk memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

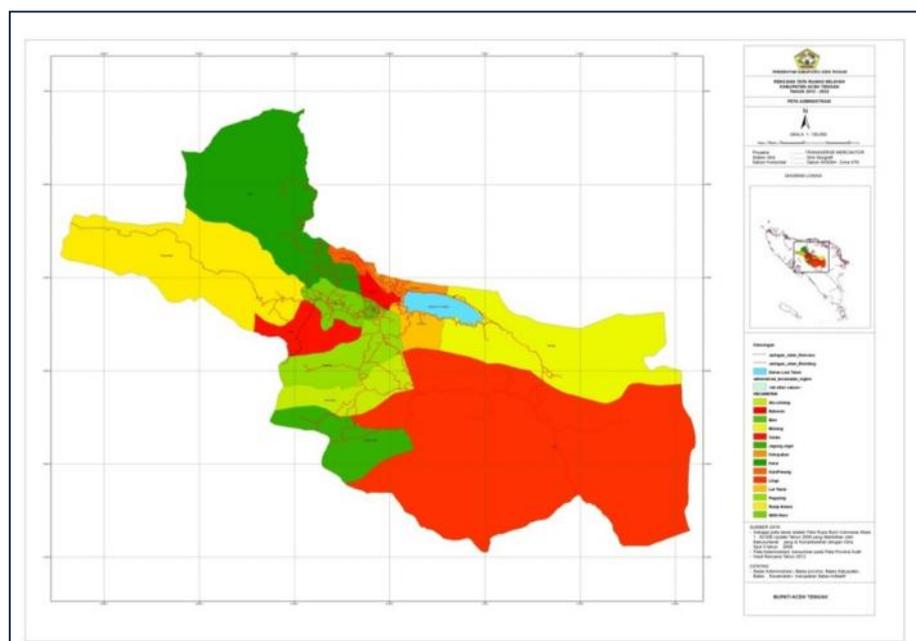
4.1.1 Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Aceh Tengah memiliki luas 452.753,40 Ha dengan batas wilayah administratif Kabupaten Aceh Tengah

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Bener Meriah, Bireuen dan Pidie;
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Timur dan Gayo Lues;
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Gayo Lues, Aceh Barat dan Nagan Raya;
- d. Sebelah Barat : Kabuapten Aceh Barat, Nagan Raya, Gayo Lues dan Pidie.

Gambar 4.1

Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Aceh Tengah



Secara administratif pemerintah, wilayah Kabupaten Aceh Tengah terbagi atas 14 kecamatan 295 kampung/desa dan 57 kampung persiapan. Nama-nama kecamatan serta luas pada masing-masing kecamatan

Tabel 4.1
Pembagian Luas Wilayah Admitrasi
Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah

No	Kecamatan	Jumlah Kampung		Luas Wilayah Luas (Ha)
		Definitif	Persiapan	
1	Linge	26	2	186.266,36
2	Bintang	24	1	52.194,84
3	Lut Tawar	18	10	8.759,04
4	Kebayakan	20	3	5.483,16
5	Pegasing	31	4	27.177,90
6	Bebesen	28	5	2.956,55
7	Kute Panang	24	1	3.514,71
8	Silih Nara	33	9	59.424,60
9	Ketol	25	6	58.965,71
10	Celala	17	7	13.620,55
11	Atu Lintang	11	2	6.717,08
12	Jagong Jeget	10	2	17.123,84
13	Bies	12	3	1.401,43
14	Rusip Antara	16	2	9.147,63
Total		295	57	452.753,40

4.2 Letak dan Kondisi Geografis

Posisi astronomi Kabupaten Aceh Tengah terletak pada $4^{\circ} 22' 14,42'' - 4^{\circ} 42' 40,8''$ LU dan $96^{\circ} 15' 23,6'' - 97^{\circ} 22' 10,76''$ BT. Dengan posisi tersebut seperti wilayah Indonesia pada umumnya, Kabupaten Aceh Tengah juga berda di kawasan iklim tropis, hal ini membuat Kabupaten Aceh Tengah selalui disinari matahari

sepanjang tahun dengan memiliki dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau. Dari sisi perbedaan waktu, Kabupaten Aceh Tengah termasuk dalam daerah Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB). Kabupaten Aceh Tengah termasuk salah satu daerah tinggi di Aceh dan merupakan bagian punggung pegunungan bukit barisan membentang sepanjang Pulau Sumatera. Disamping itu, Kabupaten Aceh Tengah memiliki suhu udara yang relatif sejuk. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Aceh Tengah berpotensi menjadi daerah wisata alam ditambah kehadiran Danau Laut Tawar yang indah dikelilingi oleh perbukitan yang ditumbuhi pohon Pinus Merkusis. Disamping itu Kabupaten Aceh Tengah merupakan daerah agraris dengan komoditi seperti : kopi Arabika, kentang, tomat alpukat, jeruk keprok dan cabai.

4.3 Topografi

Kabupaten Aceh Tengah memiliki Topografi wilayah bergunung dan berbukit dengan ketinggian rata-rata bervariasi antara 200-2.600 meter di atas permukaan laut. Penggunaan lahannya didominasi oleh kawasan hutan seluas 280.647 Ha atau 64,98% dari luas wilayah, dan sisanya berupa tanah bangunan, sawah, tegal/kebun, lading/huma, padang rumput, rawa-rawa, kolam, tambak, perkebunan areal peruntukan lainnya. Pada umumnya jenis tanahnya bervariasi, 68% diantaranya terdiri dari tanah podsolik coklat dan merah kuning dengan tekstur liat berpasir, struktur remuk, konsistensi gembur permeabilitas sedang. Keadaan tersebut menjadikan Aceh Tengah sebagai daerah yang subur dan menjadi pusat produksi hasil pertanian dataran tinggi di Provinsi Aceh. Kabupaten ini memiliki sebuah Danau yang diberi nama Danau Laut Tawar. Danau tersebut dikelilingi oleh perbukitan yang ditumbuhi Pinus Merkusis. Luas Danau ini sekitar 5.472 Ha

dengan air yang bersumber dari sejumlah mata air dan 21 buah sungai kecil termasuk sebuah sungai besar

4.4 Demografi

Demografi menggambarkan berbagai aspek tentang penduduk Aceh Tengah meliputi penyebaran penduduk perkecamatan, laju pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan migrasi juga menggambarkan komposisi dan jumlah penduduk secara keseluruhan atau kelompok tertentu didasarkan kriteria seperti pendidikan, usia, jenis kelamin, dan lapangan pekerjaan. Berikut ini tabel penduduk di Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 4.2
Jumlah penduduk Menurut jenis kelamin Tahun 2012-2016
Kabupaten Aceh Tengah

Tahun	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
	Jiwa	%	Jiwa	%	
2012	108.728	50,77	105.439	49,23	214.167
2013	112.303	50,76	108.933	49,24	221.236
2014	104.622	50,98	100.611	49,02	205.233
2015	104.900	50,89	101.250	49,11	206.150
2016	105.036	50,80	101.713	49,2	207.289

Sesuai data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, 2016, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2016 sebanyak 207.289 jiwa. Pada tahun 2012 jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Tengah dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 108.728 jiwa sedangkan dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 105,439 jiwa. Berdasarkan data di atas

dapat kita simpulkan jumlah penduduk perempuan lebih besar di bandingkan laki-laki. Berikut jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tengah per kecamatan menurut jenis kelamin

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Tengah Per Kecamatan
Menurut Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Sex Rasio
	Linge	5.030	4.965	9.995	101,31
	Silih Nara	11.615	11.239	22.854	103,35
	Bebesen	19.469	19.174	38.643	101,54
	Pegasing	10.855	10.243	21.098	105,97
	Bintang	5.242	5.145	10.387	101,89
	Ketol	7.394	6.998	14.392	105,66
	Kebayakan	8.865	8.621	17.486	102,83
	Kute Panang	4.326	4.069	8.395	106,32
	Celala	4.971	4.814	9.785	103,26
	Lut Tawar	10.618	10.235	20.853	103,74
	Atu Lintang	3.719	3.460	7.179	107,49
	Jagong Jeget	5.338	4.961	10.299	99,95
	Bies	3.935	3.937	7.872	103,35
	Rusip Antara	4.212	3.839	8.051	109,72
	Jumlah Total	105.589	101.700	207.289	103,82

Dari tabel diatas dapat kita lihat jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Bebesan dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak 19.174 jiwa dan laki-laki sebanyak 19.469 jiwa dengan jumlah sebanyak 36.643 jiwa. Sedangkan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Atu Lintang dengan jumlah penduduk sebanyak 7.179 jiwa yang terdiri dari 3.719 laki-laki dan perempuan 3.460 jiwa. Penyebaran Penduduk sebagian besar terkonsentrasi pada Daerah Perkotaan seperti Kecamatan Bebesan, Lut Tawar dan Kebayakan.

4.5 Pertumbuhan Ekonomi

PDRB Aceh Tengah tahun 2015 sebesar 4.20 persen mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2014 yaitu 4,05 persen. Sektor Pertanian, Kehutan dan Kelautan masih berperan penting terhadap laju pertumbuhan Perekonomian Aceh Tengah. Perannya mencapai 44.84 persen pada tahun 2015.

Tabe 4.4
PDRB Kabupaten Aceh Tengah Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
A.	Pertanian, Kehutan, dan Perikanan	45,21	45,62	45,00	44,4	43,99
B.	Pertambangan dan Kelautan	1,32	1,32	1,39	1,38	1,36
C.	Industri Pengolahan	1,39	1,38	1,4	1,4	1,42
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

	Ulang					
F.	Konstruksi	12,55	12,71	13,08	13,62	13,53
G.	Perdagangan Besar dan Eceran : Respirasi Mobil dan Sepeda Motor	12,07	11,94	12	1,02	12,07
H.	Transportasi dan Pergudangan	4,84	4,67	4,56	4,47	4,33
I.	Penyediaan Akomodasi Makan Minum	1,17	1,19	1,23	1,25	1,30
J.	Informasi dan Komunikasi	2,76	2,82	2,83	2,83	2,84
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,73	1,66	1,76	1,76	1,82
L.	Real Estat	2,98	2,93	2,91	2,87	2,83
M,N	Jasa Perusahaan	0,53	0,52	0,51	0,50	0,50
O.	Admitrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,00	7,95	8,12	8,31	8,77
P.	Jasa Pendidikan	1,73	1,70	1,67	1,64	1,64
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,26	2,22	2,2	2,21	2,24
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,34	1,26	1,21	1,21	1,20

Sumber : BPS.go.id

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2012-2016 mengalami peningkatan pada sektor pertanian, kehutanan dan kelautan yaitu sebesar 43,99 persen pada tahun 2016, sedangkan pada sektor penyediaan akomodasi makan dan minum sebesar 1,23 pada tahun 2013. Sektor Jasa Lainnya mengalami penurunan pada setiap tahun pada tahun 2016 sebesar 1,20 persen. Untuk sektor admitrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial mengalami pertumbuhan setiap tahunnya pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 8,77 %.

4.6 Kemiskinan

Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya (didekati dengan pengeluaran) lebih kecil dari pendapatan yang di butuhkan untuk hidup secara layak diwilayah tempat tinggalnya. Kebutuhan untuk hidup layak tersebut diterjemahkan sebagai suatu jumlah rupiah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi makanan setara 2.100 Kalori sehari (garis kemiskinan makanan) dan pengeluaran untuk bukan makanan seperti perumahan, pakaian, pendidikan dan kesehatan (garis kemiskinan non makanan). Jumlah rupiah tersebut kemudian disebut sebagai garis kemiskinan.

Berikut ini menunjukkan bahwa tabel perkembangan kemiskinan yang terdapat di Kabupaten Aceh Tengah

Tabel 4.5
Perkembangan Indeks Kemiskinan Tahun 2012-2016
Kabupaten Aceh Tengah

No	Indek Kemiskinan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	34.500	33.600	32,810	34.260	33.160
2.	Penduduk Miskin (%)	18,78	17,76	16,99	17,51	15,99
3.	Garis Kemiskinan (Rp)	389.755	370.670	374.989	380.858	397.859
4.	Penduduk Miskin Prov Aceh (%)	19,46	17,60	16,98	17,08	16,43

Garis kemiskinan di Kabupaten Aceh Tengah selama 5 (lima) tahun terakhir rata-rata sebesar Rp 397.859,00, sementara pada rentang tahun 2012-2014 persentase penduduk miskin di kabupaten Aceh Tengah terus mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,86 persen per tahun, sebaliknya pada tahun 2015 persentase penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 17,51 persen bertambah sebesar 0,52 persen dari tahun 2014. Pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin berjumlah 34.260 jiwa dan mengalami penurunan pada tahun 2016 yaitu sebesar 33.160 jiwa

4.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk yang meliputi: Angka Harapan Hidup (AHH) yang digunakan untuk mengukur peluang hidup; Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf yang digunakan untuk mengukur status tingkat pendidikan serta pengeluaran riil perkapita atau untuk mengukur akses terhadap sumber daya guna mencapai standar hidup layak. Dengan demikian, IPM yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Namun, sebaliknya IPM yang rendah menunjukkan ketidak berhasilan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi suatu daerah.

Tabel 4.6
Perkembangan Indeks Kemiskinan Tahun 2012-2016
Kabupaten Aceh Tengah

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016

IPM Aceh Tengah	70,18	70,51	70,96	71,51	72,04
IPM Aceh	67,81	68,3	68,31	69,45	70,00

Kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama periode tahun 2012-2016 meningkat secara linier yaitu pada tahun 2012 sebesar 70,18 meningkat menjadi 72,04 pada tahun 2016, angka ini jauh lebih besar bila dibandingkan IPM secara Provinsi Aceh yang angkanya hanya 70,00 pada tahun 2016. IPM ini akan menurun atau melambat perkembangannya apabila tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat menurun demikian juga halnya IPM akan berkembang dengan baik apabila tingkat kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat membaik. Untuk lebih jelasnya perkembangan dan perbandingan angka IPM antara Provinsi dan Kabupaten Aceh tengah dari tahun 2012 sampai tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut.

4.8 Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten Aceh Tengah sangat fluktuatif, dimana pada tahun 2012 sebesar 0,39 persen (BPS Aceh, mengacu ke wilayah Lhokseumawe) pada tahun 2013 dan 2014 mengalami peningkatan tajam menjadi 8,27 dan 8,53 persen. Inflasi tahun 2015 lebih terkendali karena lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,44 persen. Tahun 2015, harga-harga berubah naik/inflasi terjadi ketika ada momentum tertentu, seperti bulan puasa ramadhan, perayaan hari raya idul fitri sampai dengan hari libur panjang akhir tahun. Nilai

inflasi rata-rata Kabupaten Aceh Tengah untuk tahun 2012-2016 disajikan pada

Tabel 4.7

Tabel 4.7
Nilai Inflasi Rata-Rata Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2012-2016

Wilayah Inflasi	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Aceh Tengah	0.39	8.27	8.53	2,44	
Lhoksumawe	0,39	8,27	8,53	0,39	5,60
Meulaboh	0,66	6,39	7,83	0,66	3,37
Aceh	0.22	7.31	8.09	1,53	3,95

Sumber : BPS Aceh, 2016

4.9 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang di pungut berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah sesuai Perundang-undangan.

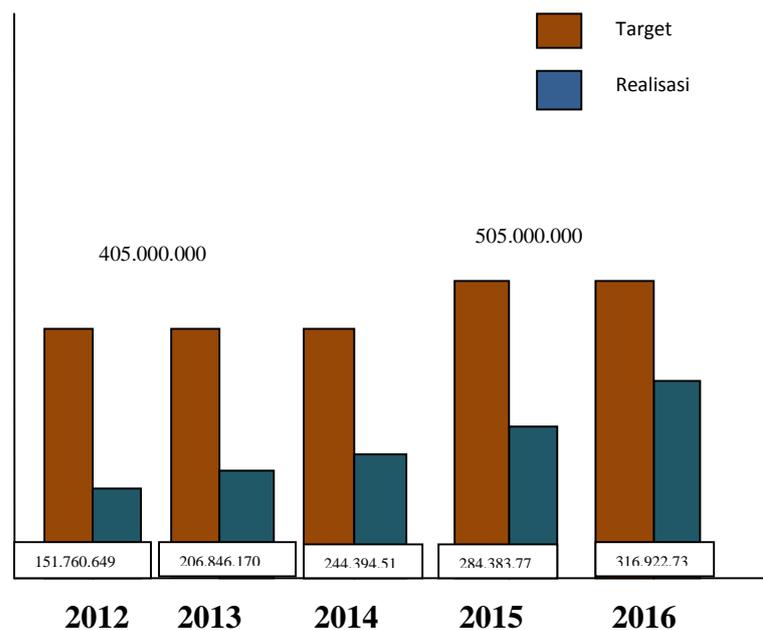
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tengah.

Tabel 4.8
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011-2016

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Retribusi Daerah
2011	20.780.854.963,00	4.022.397.348,00	12.494.831.787,00
2012	55.832.064.049,73	5.060.477.081,03	6.782.789.904,00
2013	76.870.466.782,32	5.929.486.657,00	7.351.624.211,00
2014	132.068.284.863,30	6.685.996.921,00	9.999.224.701,00
2015	157.886.839.912,16	9.838.059.365,75	7.698.231.984,00
2016	144.355.165.587	10.678.666.554	6.063.907.206,80

Pada tabel di atas merupakan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Tengah dari tahun 2011-2016 yang di peroleh dari pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi Daerah mengalami kenaikan pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp 12.494.831.787,00 sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan. Sedangkan pajak daerah mengalami kenaikan setiap tahunnya pada tahun 2016 sebesar Rp 11.465.487.062,01. Pendapatan Asli Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 157.886.839.912,16

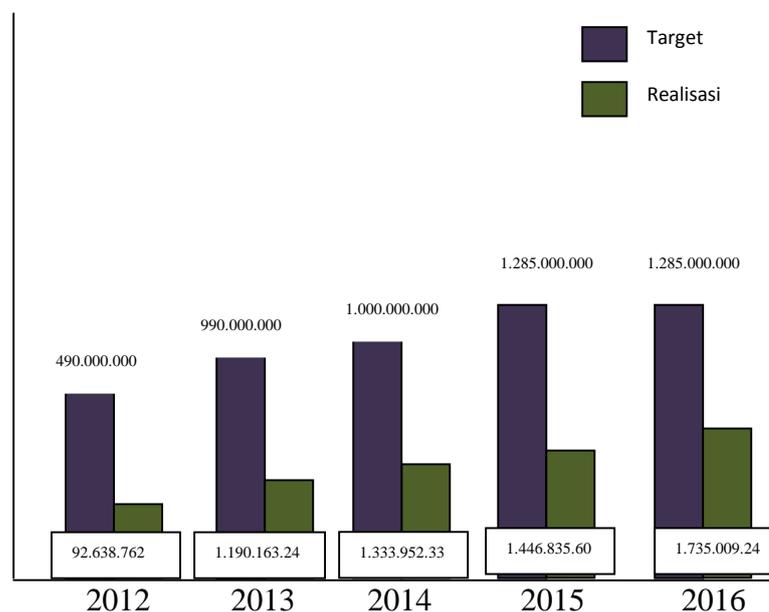
Tabel 4.9
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel terhadap PAD
di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2016



Pada tahun 2012-2016 pendapatan yang diperoleh mengalami kenaikan walaupun belum mencapai target yang telah ditentukan. Pada tahun 2012-2014 target yang telah ditetapkan sebesar Rp 405.000.000. Pada tahun 2012 realisasi yang diperoleh dari pajak hotel sebesar Rp 151.760.649 dengan target Rp 405.000.000

dari target pada tahun 2015 dan 2016 target Rp 405.000.000. pada tahun 2015-2016 target mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 505.000.000 hal ini disebabkan realisasi yang di peroleh juga mengalami kenaikan sebesar Rp 316.922.736 pada tahun 2016 . Hal ini disebabkan karena jumlah pengunjung hotel mengalami kenaikan yang meyebabkan realisasi mengalami kenaikan. Dapat disimpulkan penerimaan pajak hotel dari tahun 2012-2016 realisasi yang diperoleh belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena jumlah hotel yang ada tidak seimbang dengan jumlah wisatawan, disebabkan karena untuk mengunjungi objek wisata tidak perlu untuk terlalu lama untuk menginap hal ini juga yang membuat kunjungan hotel mengalami penurunan

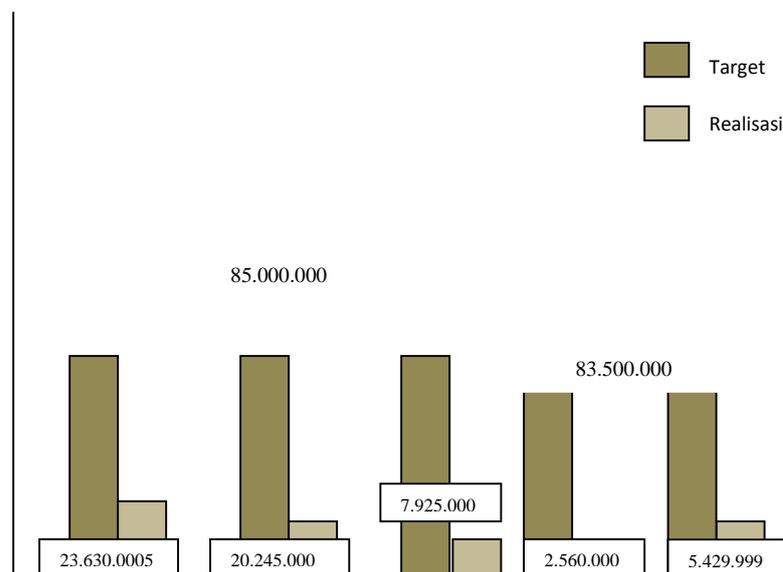
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran terhadap PAD di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2016



Sedangkan untuk pajak restoran dari tahun 2013-2015 realisasi yang diperoleh sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2015 realisasi yang diperoleh sebesar Rp 2.560.000 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 1.285.000. hal ini dapat membantu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di

Kabupaten Aceh Tengah. Pajak hiburan yang diperoleh dari tahun 2012-2016 realisasi yang diperoleh mengalami penurunan dan belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran wajib pajak atas utang pajaknya atau dalam membayar pajak. Padahal pajak adalah salah satu kewajiban yang harus dibayar masyarakat untuk membiayai pengeluaran umum disuatu daerah

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan terhadap PAD di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2016



Pada tahun 2012 realisasi yang di peroleh sebesar Rp 23.630.000 sedangkan target yang telah ditetapkan sebesar Rp 85.000.000. Namun pada tahun 2015 realisasi yang diperoleh ,mengalami penurunan sebesar Rp 2.560.000 dan target yang ditetapkan juga mengalami penurunan sebesar Rp 83.500.000 dengan persentase sebesar -0,96% hal ini dikarenakan acara hiburan yang ada di Aceh Tengah relatif sedikit salah satu hiburan atau pun kegiatan yang sering dilakukan yaitu acara tradisonal seperti pacuan kuda kegiatan yang aktif dilaksanakan dalam tiap tahunnya hal ini yang membuat realisasi yang diperoleh tidak mencapai target untuk menaikan Pendapatan Asli Daerah.

mencapai pada tahun 2012 realisasinya sebesar Rp 151.760.649 belum memenuhi target yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan pertumbuhan sebesar 81,5% meskipun realisasi yang diperoleh belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dapat disimpulkan penerimaan pajak hotel dari tahun 2012-2016 realisasi yang diperoleh belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena jumlah hotel yang ada tidak seimbang dengan jumlah wisatawan, disebabkan karena untuk mengunjungi objek wisata tidak perlu untuk terlalu lama untuk menginap hal ini juga yang membuat kunjungan hotel mengalami penurunan. Sedangkan untuk pajak restoran dari tahun 2013-2015 realisasi yang diperoleh sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2015 realisasi yang diperoleh sebesar Rp 2.560.000 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 1.285.000. hal ini dapat membantu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Tengah. Pajak hiburan yang diperoleh dari tahun 2012-2016 realisasi yang diperoleh mengalami penurunan dan belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran wajib pajak atas utang pajaknya atau dalam membayar pajak. Padahal pajak adalah salah satu kewajiban yang harus dibayar masyarakat untuk membiayai pengeluaran umum disuatu daerah.

Tabel 4.9
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016

Pendapatan Asli Daerah	APBK	Realisasi	Persentase
Pendapatan Asli Daerah	182.654.626.749	144.355.165.587	79,03%
Pajak Daerah	9.564.894.000	10.678.666.554	111,64%
Pajak Hotel	505.000.000	316.922.736	62,76%

Pajak Restoran	1.285.000.000	1.735.009.247	135,02%
Pajak Hiburan	83.500.000	5.429.999	6,50%
Pajak Reklame	471.294.000	241.766.118	51,30%
Pajak Penerangan Jalan	2.895.100.000	3.217.022.859	111,12%
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	2.000.000.000	3.950.572.674	197,53%
Pajak Air Bawa Tanah	25.000.000	-	-
Pajak Bumi dan Bagunaan (PBB)	1.800.000.000	1.072.117.521	59,56%
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bagunan (BPHTB)	500.000.000	139.825.400	27,97%

Dari tabel 4.10 di atas Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat persentase pajak restoran sebesar 135,02% lebih besar dibandingkan persentase pajak hotel sebesar 67,76%. Sedangkan untuk pajak hiburan sebesar 6,50%.

Dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Tengah mengalami kenaikan setiap tahunnya walaupun tidak begitu signifikan. Namun peneliti mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 2012-2016 pajak hotel dan pajak hiburan tidak memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Tengah. Salah satu faktor penyebabnya, yaitu sebahagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan pusat. Hal itu menyebabkan tersendatnya penerimaan pajak yang berasal dari daerahnya sendiri dalam mengali potensi daerah tersebut.

Retribusi daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan daerah yang menjadikan pendapatan asli daerah sebagai indikatornya hal ini dapat

dilihat dari upaya pemerintah daerah bahwa retribusi daerah yang tinggi akan membuat pemerintah daerah semakin berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, daerahnya dalam melakukan pembiayaan atas belanja daerah yang terus meningkat.

4.2 Pembahasan

4.1 Analisa Perkembangan Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang di usahakan dapat berperan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, penerimaan daerah, penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha serta memiliki ciri khusus dari sektor lain yang dapat menjaga kelestarian lingkungan. Sektor kepariwisataan merupakan sumber devisa yang cukup besar persentase dan kontribusinya bagi kas daerah, yang secara luas juga merupakan sumber devisa negara.

Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagi Provinsi Aceh khususnya Aceh Tengah, hal ini disebabkan pariwisata merupakan salah satu primadona dalam meningkatkan pendapatan daerah, karena Provinsi Aceh sangat kaya akan potensi obyek wisata alam. Aceh Tengah memiliki potensi dan daya tarik tersendiri dibidang pariwisata untuk dikunjungi oleh wisatawan lokal, luar daerah ataupun wisatawan. Potensi-potensi di Kabupaten Aceh Tengah merupakan objek wisata yang mempunyai prospek cukup baik sebagai daerah tujuan wisata karena mempunyai potensi alam yang sangat mendukung. Jenis objek wisata daya tarik wisata di Kabupaten Aceh Tengah di kelompokkan ke

dalam 3 (tiga) jenis wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Dibawah ini nama-nama tempat wisata yang berada di Kabupaten Aceh Tengah.

Tabel 4.10
Objek Wisata
di Kabupaten Aceh Tengah

No	Nama Objek Wisata	Alamat
1.	Argo Wisata (Kebun Nenas Pengasing)	Pegasing Kec. Pengasing
2.	Argo Wisata Ujung Paking	Kampung kelitu, Kec. Bintang
3.	Ait Terjun Mengaya	Kampung Mengaya, Kec. Bintang
4.	Atu Belah	Kampung Penarun, Kec. Linge
5.	Air Terjun Karang Ampar Ketol	Kec Ketol
6.	Gayo Water Park	Pegasing Kec. Pengasing
7.	Lapangan pacuan kuda Tradisional	Kamp. Blang Bebangka, Kec. Pegasing
8.	Loyang Datu	Kampung Robel, Kec. Linge
9.	Loyang Koro	Kampung Toweren , Kec. Lut Tawar
10.	Loyang Putri Pukes	Kampung Mendale, Kec. Kebayakan
11.	Lut Kucak Gegarang	Kec. Jagong Jeget
12.	Pantan Terong	Kampung Bahagie Kec. Bebesen
13.	Pante Gemasih	Kampung Kelitu Kec Bintang
14.	Pante Lung Toweren	Kampung Toweren Kec. Bintang
15.	Pante Menye	Kampung Genuren Kec. Bintang
16.	Umah Pitu Ruang Linge	Kec. Bebesen

17.	Bur Birah Panyang	Toweren Uken Kec Lut Tawar
18.	Dermaga Teluk Suyen	Nosar Kec Bintang
19.	Dermaga Dedalu	Kampung Dedalu Kec Lut Tawar
20.	Loyang Mendale	Kampung Mendale Kec Kebayakan
21.	Arus Jeuran Sungai Peusangan	Jln Lukup Dadak Kb Aceh Tengah
22.	Kebun Apel	Kampung Despot Linge Kec. Linge
23.	Danau Lut Tawar	Tekengon, Kab Aceh Tengah
24.	Bur Telege	Hakim Bale Bujang Kec Lut Tawar
25.	Buntul Rintis	Kampung Tensaren Kec Bebesen

Berdasarkan nama-nama objek wisata di Kabupaten Aceh Tengah yang peneliti dapatkan dilapangan menunjukkan bahwa ada dua puluh lima objek wisata yang di Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari objek wisata alam dan wisata budaya. Pada tahun 2015 18 jenis wisata yang dapat dikunjungi di Kabupaten Aceh Tengah diantaranya Atu Belah, Lapangan pacuan kuda, Loyang Datu, Loyang Koro, Loyang Puteri Pukes, Umah Pitu Rime Linge, Loyang Mendale , Danau Laut Tawar, Argo wisata kebun nanas, argo wisata ujung paking, air terjun mengaya, air terjun karang ampar ketol, Gayo water park, Lut Kucak gegarang, pante gemasih, Pante Lung Toweren, Pante Menye dan Umah Pintu Ruang. Perkembangan pariwisata semakin meningkat pada tahun 2016 objek wisata yang terdapat di Kabupaten Aceh Tengan bertambah tiga yaitu Bur Birah Panyang, kebun apel, Bur Telege dan buntul Rentes sedangkan pada tahun 2017 objek

wisata yang berda di Kabupaten Aceh Tengah bertambah sebanyak tiga yaitu Dermaga Teluk Suyen, Dermaga Dedalu, dan arus jeuram sungai pusangan. Pada saat ini wisata alam lebih diminati dari pada wisata budaya padahal masyarakat etnis Gayo memiliki adat, budaya dan tradisi yang seharusnya bisa menjadi salah satu destinasi wisata budaya di Kabupaten Aceh Tengah. Objek wisata di Kabupaten Aceh Tengah tersebut tidak semua di kelola oleh pemerintah khususnya oleh Dinas Priwisata di Kabupaten Aceh Tengah, namun banyak dikelola secara pribadi oleh masyarakat. Dari adanya objek wisata tersebut dapat membantu masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah memiliki mata pencarian baru dengan membuka jasa usaha pariwisata, sehingga dari kegiatan usaha tersebut semakin meningkatnya pendapatan masyarakat akan memberikan efek berupa kontribusi pendapatan daerah di Kabupaten Aceh Tengah.

Dapat disimpulkan bahwa perkembangan objek wisata di Aceh tengah megalami peningkatan setiap tahun hal ini dapat dilihat jumlah objek wisata mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah bertujuan untuk meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisatawan. Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam mendorong kegiatan perekonomian masyarakat terutama untuk memberikan perluasan kesempatan kerja serta meningkatkan cita daerah. kontribusi sektor pariwisata dapat diketahui dengan perkembangan jumlah kunjungan wisata dan perkembangan jumlah hotel dan penginapan yang menampung pariwisata. Berikut tabel jumlah kunjungan wisata yang berwisata Ke Kabupaten Aceh Tengah

Tabel 4.11
Jumlah Pengunjung wisata di Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2010-2016

Tahun	Jumlah Wisatawan			Pertumbuhan
	Nusantara	Mancanegara	Total	
2010	23,280	505	528,28	77%
2011	22,324	849	871,324	55%
2012	25,880	629	654,88	53%
2013	30,197	604	634,197	57%
2014	33,891	643	676,891	85%
2015	35,325	920	955,325	60%
2016	36,249	671	707,249	62%

Sumber Bps Aceh Tengah

Dapat dilihat dari tabel bahwa jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Aceh Tengah mengalami kenaikan setiap tahun terutama wisatawan nusantara yaitu pada tahun 2017 sebanyak 38,669 orang. Pada tahun 2015 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami kenaikan sebanyak 920 orang dan wisatawan nusantara sebanyak 35,325 orang. Hal ini di sebabkan karena pada tahun 2015 terdapat salah satu objek wisata di Kabupaten Aceh Tengah yang menarik perhatian wisatawan yaitu Festival Panen kopi Gayo, adalah sebuah kegiatan perhelatan budaya dan pengembangan pariwisata berbasis komunitas dan masyarakat di Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Dimana Kabupaten Aceh Tengah terkenal dengan kopi Gayo atau kopi Arabika. Kopi yang menjadi komoditi unggulan ini di budidayakan di dataran tinggi Gayo yaitu tepatnya di Kabupaten Aceh Tengah yang merupakan salah satu tanaman perkebunan yang menjadi produk ekspor unggulan di Indonesia. Kopi Gayo ini juga telah mendapatkan predikat *Fair Trade Certified* dan juga mendapatkan sertifikat IG atau Indikasi Geografis yang diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Akan

tetapi untuk wisatawan mancanegara mengalami penurunan pada tahun 2016 yaitu sebesar 671 orang hal ini disebabkan Aceh merupakan wisata syariat islam hal ini yang membuat wisatwan mengalami penurunan karena banyak peraturan-peraturan untuk megunjungi wisata yang ada di Aceh salah satunya objek wisata yang ada di Aceh Tengah. Sedangkan dari sisi pertumbuhan pada tahun 2014 sebesar 85% pada pada tahun 2016 sebesar 60%. Untuk memudahkan wisatawan yang berkunjung wisata ke Kabupaten Aceh Tengah, maka terdapat beberapa tempat penginapan yang berada di Kabupaten Aceh Tengah di antara nya yaitu :

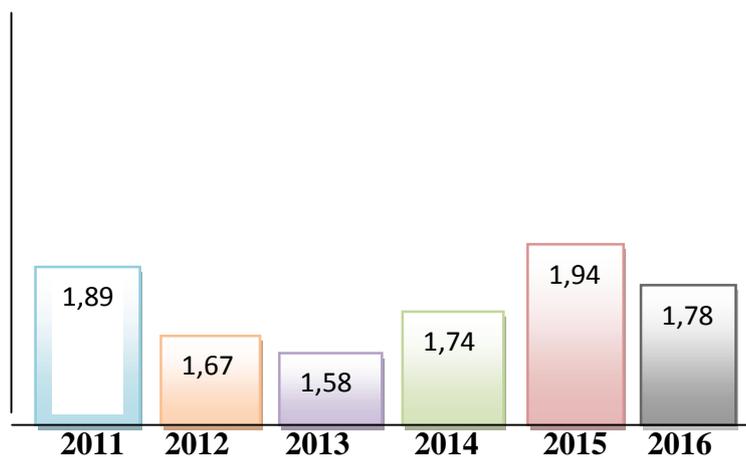
Tabel 4.12
Daftar Penginapan Kabupaten Aceh Tengah

No	Nama Penginapan	Alamat
1.	Renggali Hotel	Ujung Baro
2.	Mahara Hotel	Jln. Sengeda No. 568
3.	Grand Penemas	Komplek Terminal TKN
4.	Triagra Hotel	Jln. Pasar Impres
5.	Linge Land Hotel	Jln. Yos Sudarso
6.	Hotel Bunda	Sp. 4 Reje Bukit
7.	Wisma Umah Opat	Jln. Bireun-Takengon
8.	Losmen Fajar	Jln. Mahkama No. 8
9.	Batang Ruang	Jln. Sentosa No. 7
10.	Libra Indah	Jln. Yos Darso No. 267
11.	Muatiara	Jln. Lembaga Blang Kolak I
12.	Hotel Merlin	Jln. Yos Sudarso, Tansaril
13.	Arizona Hotel	Jln. Sengeda Takengon
14.	Wisma Intan	Jln. Mersah, Kp. Merah Mersah
15.	Bayu Hill	Jln. Lebe Kader
16.	Syariah Darussalam	Jln. Lintang Takengon
17.	Penginapan Nacara	Jln. MJM

18.	Wisama Harapan Jaya	Jln. Lintang
-----	---------------------	--------------

Perkembang tempat menginap di Kabupaten Aceh Tengah mengalami peningkatan dari sebelumnya terdapat beberapa tempat penginapan yang ada di Aceh Tengah yaitu Rengali hotel, mahara, hotel bunda, wisma intan, grand penemas, libra indah, mutiara, hotel merlin, batang ruang dan syariat islam. Banyak tempat wisata, pada tahun 2010-2014 tempat penginapan mengalami penambahan diantaranya Ling land, losmen fajar, arizona hotel, penginapan nacara dan harapan jaya. Dan pada tahun 2015-2018 tempat penginapan bertambah yaitu sebanyak tiga diantara bayu hill, wisma umah opat dan triarga hotel. Hal ini untuk memudahkan wisatawan untuk menginap jika berkunjung ke Kabupaten Aceh Tengah.

Gambar 4.2
Perkembangan Rata-rata Lama Menginap pada Hotel
di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2011-2016 (hari)



Rata-rata lama menginap tamu pada hotel bintang tahun 2013 adalah 1,58 hari, paling rendah dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Dari tahun 2011-2013 rata-rata lama menginap mengalami penurunan akan tetapi pada tahun 2014-2015

mengalami kenaikan sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 1,78 hari. Selama periode 2011 hingga 2016, rata-rata lama menginap pada hotel bintang adalah antara satu sampai dua hari. Hal ini disebabkan karena untuk mengunjungi sebahagian objek wisata yang berada di Kabupaten Aceh Tengah dengan jarak tempuh yang dilalui tidak terlalu jauh menuju objek wisata yang ada di Kota Takengon hal ini yang membuat rata-rata lama menginap pada hotel antara satu sampai dua hari.

2.2 Perkembangan Retribusi Daerah selama pengembangan objek wisata di Kabupaten Aceh Tengah

Retribusi pariwisata merupakan pungutan yang dikenakan kepada setiap pengunjung yang datang ke lokasi tempat rekreasi termasuk golongan retribusi jasa usaha, tingkat penggunaan jasa retribusi tempat rekreasi diukur berdasarkan jenis fasilitas, luas dan waktu pemakaian serta pelayanan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien, efektif dan berorientasi pada harga pasar. Dari retribusi tersebut nantinya akan digunakan sebagai perbaikan serta penambahan sarana dan prasarana yang masih kurang memadai ditempat rekreasi tersebut. Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam mendorong kegiatan perekonomian masyarakat terutama untuk memberikan perluasan kesempatan kerja serta meningkatkan citra daerah. Pada saat ini perkembangan retribusi di Aceh Tengah pada tahun 2016 pendapatan retribusi mengalami penurunan dengan pesentase sebesar 45,1%. Sedangkan jumlah kunjungan wisata mengalami kenaikan setiap

tahunya hal ini terjadi karena pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan daerah. salah satu faktornya yaitu retribusi daerah dan tarif objek wisata. Dalam hal ini apabila penerimaan retribusi semakin meningkat dan tarif objek wisata meningkat maka Pendapatan Asli Daerah juga mengalami peningkatan. Pemungutan retribusi memasuki kawasan tempat rekreasi merupakan salah satu dari beberapa jenis pemungutan retribusi yang ada di pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Kebijakan retribusi pariwisata ini dalam meningkatkan fasilitas pelayanan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terlebih tahun 2015-2016. Dilihat dari segi efektivitas perkembangan setiap tahun sudah baik untuk keseluruhan. Persentase dari pendapatan yang ditunjukkan juga sudah bagus. Akan tetapi tidak diimbangi dengan kekuatan finansial yang mendukung kemajuan daya tarik wisata yang ada di Aceh Tengah. Hambatan atau faktor kendala yang dihadapi oleh sektor pariwisata yang terjadi dalam kajian perkembangan retribusi pariwisata di lapangan adalah kurangnya fasilitas pendukung sarana dan prasarana.

2.3 Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam mengembangkan Pariwisata

Model pengelolaan pariwisata budaya di Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan hasil observasi dan pengamatan peneliti di lapangan mengenai model pengelolaan pariwisata yang ada di Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut :

Pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah dikelola oleh pemerintah dan masyarakat/swasta. Pemerintah membuat even-even seperti pemilihan duta wisata, pemilihan duta wisata yang diselenggarakan setahun sekali untuk memilih

wen dan ipak Takengon yang nanti akan mempromosikan wisata yang berada di Kabupaten Aceh Tengah baik pada tingkat Kabupaten maupun Provinsi. Expo Gayo yaitu menampilkan pengelaran kesenia seperti kesenian tradisional yaitu didong, tari guel dan sebagainya sedangkan untuk pelestarian budaya yaitu dengan cara mengadakan acara tradisional seperti pacu kuda. Pacu kuda atau dengan bahasa setempat menyebutnya “pacu kude” adalah olahraga berkuda, kuda dilatih untuk berpacu menuju garis akhir (finish) melawan peserta yang lain. Pacuan kuda ala Gayo ini memiliki keunikan tersendiri, mulai dari nama kuda hingga penunggang atau joki cilik ini pun tanpa mengenakan plena, melainkan hanya memegang sebuah rotan di tangan. Tradisi pacuan kuda diselenggarakan 2 kali setiap tahunnya yaitu bulan Ferbuari memperigati hari jadi Kota Takengon dan bulan Agustus memperiangati hari ulang tahunnya Republik Indonesia.

Sedangkan masyarakat/swasta membuat objek wisata berupa agrowisata seperti kebun kopi sehingga para wisatawan bisa belajar dan melihat sendiri bagaimana proses pengolaan kopi. Pada tahun 2016 di Aceh Tengah di buka sebuah cafe bernama galeri kopi, yang dikelola oleh seorang pemuda gayo yang bernama Sahrul Iman. Dimana di galeri kopi gayo ini pengunjung bisa menikmati secangkir kopi dengan suasana yang nyaman dan sejuk sambil memandang perkebunan kopi. Pengelaran kesenian dalam upacara perkawinan/mungerje adalah dengan menampilkan tari tradisional yaitu tari munalo atau munalu adalah tarian khas suku gayo yang ditunjukkan untuk menyambut tamu kehormatan atau undangan pernikahan secara harifah, tarian munalo berasal dari istilah munalu yaitu rangkaian prosesi menyambut, menyempit, mengarak pada upacara perkawinan masyarakat suku gayo guna memuliakan tamu undangan dengan

segala hormat dan mengucapkan syukur atas terjalinya silaturahmi di antara kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan sehingga suasana menjadi lebih akrab dan meriah. Ikan depik merupakan salah satu ikan khas yang terdapat di danau laut tawar. Ikan depeik berbentuk kecil dan memanjang hampir menyerupai ikan teri, ikan depik biasanya diolah untuk masakan khas gayo seperti peungat dan dedah. Setiap adat dan budaya suku bangsa pasti memiliki simbol yang melambangkan keteguhan prinsip, kehidupan sosial, agama dan juga melambangkan adat istiadat serta budaya bangsa tersebut. Begitu pula dengan Aceh Tengah memiliki simbol yang khas yaitu kerawang gayo yang merupakan sebuah simbol kemegahan masyarakat gayo yang melambangkan prinsip, agama, adat istiadat, kehidupan sosial dan budaya. Hingga kini masyarakat gayo masih melestarikan kerawang sampai saat ini. Kerawang dulunya merupakan ukiran pada rumah adat gayo atau pintu ruang, motif ukiran pada kayu inilah yang kemudian menginspirasi ahli seni gayo untuk membuatnya di sebidang kain dengan cara ditenun, bahkan bukan hanya di kain saja kerawang juga memiliki corak yang khas dan sarat dengan unsur etnis yang kental dan menghiasi segala macam kerajinan khas Aceh Tengah seperti; tas, pakaian, aksesoris, hiasan dinding dan sebagainya. Pemerintah juga bekerja sama dengan masyarakat/swasta untuk menyediakan penginapan seperti hotel, wisma maupun losmen untuk memudahkan wisatawan jika ingin menginap di Kabupaten Aceh Tengah. Untuk mengembangkan objek wisata tersebut pemerintah dan masyarakat mempromosikan melalui media online, cetak dan sebagainya atau pun dengan mengadakan even- even seperti festival kopi gayo dan Expo Gayo yang

diselenggarakan di Kabupaten Aceh Tengah ataupun di Kabupaten/Kota lainnya. Berikut gambar model pengelolaan pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah.

Berdasarkan model pengelolaan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat/swasta masih kurangnya dalam mengembangkan pariwisata yang ada, khususnya dibidang pariwisata budaya hal ini yang membuat kurangnya minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Aceh Tengah. Dapat disimpulkan model pengelolaan pariwisata di Aceh Tengah tidak secara keseluruhan dikelola oleh pemerintah dan masyarakat. Masyarakat secara individual, pemerintah juga menjalankan fungsinya sebagai sendiri, kendala dalam pengembangan pariwisata kurangnya sarana dan prasarana.

Tabel 4.13
Program tahunan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Aceh Tengah 2016

No	Program Acara	Kegiatan
1.	Pengembangan objek wisata unggulan	Pacuan kuda Tradisional
2.	Pengembangan daerah tujuan wisata	Duta wisata
3.	Pemeliharaan rutin/berkala objek wisata	Pemeliharaan

Program tahunan yang dilakukan oleh pemerintah pariwisata, pemuda dan olahraga di Kabupaten Aceh Tengah yaitu pacuan kuda yang dilaksanakan pada bulan Februari dan Agustus di lapangan Belang Bebangka, pemilihan duta wisata

yang dilaksanakan pada bulan mei di gedung olah seni, dan pemeliharaan obyek wisata pada bulan januari yang tempat pelaksanaanya di Pantan Terong,Linge, Putri Pukes, dan mengaya. Hal ini dilakukan pada setiap tahunya untuk mempromosikan wisatawan dan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara.

Pariwisata akan berkembang dan maju jika pengelolahaanya juga baik dan berkelanjutan, dalam pengelolaan pariwisata harus adanya kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Kegiatan tersebut diatur pemerintah, pengelolaan yang baik adalah pengelolaan yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja tetapi juga melibatkan masyarakat dan swasta, karena keterpaduan kerjasama akan menghasilkan tujuan bersama bagi masa depan suatu pariwisata. Adapun

2.3 Upaya pengembangan Objek Wiasata

Dengan berlakunya UUU NO 22 tahun 1999 dan UU NO 25 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Daerah itu di tuntutan untuk selalu berupaya semaksimal mungkin dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada, salah satunya adalah potensi pariwisata. Dengan otonomi daerah tersebut pemerintah pusat memeberikan wewenangan kepada pemerintah daerah secara penuh dalam mengelolah dan memanfaatkan potensi parawisata yang ada di daerahnya. Serta menentapkan dan mengusahakan sendiri dalam melaksanakan penegembanganya. Wewenang diberikan kepada

daerah karena pemerintah daerah lebih mengerti dan memungkinkan untuk dapat memmbudayakan potensi parawisata.

Kabupaten Aceh Tengah memiliki potensi wisata, baik itu objek wisata alam, wisata sejarah dan lain-lain. Hal ini tentu sangat membatu kepariwisataan di daerah ini khususnya di daerah ini khususnya dalam perekonomian penduduk setempat. Untuk memberikan arahan yang lebih jelas tentang pengembangan pariwisata perlu ditetapkan bebrapa kriteriaseperti yang diperkenalkan oleh Rev O'Grady berikut ini

- Pembuatan keputusan tentang objek wisata di suatu daerah harus dikonsultasikan dengan penduduk setempat.
- Keuntungan yang diperoleh dari pariwisata selaknya harus dibagi dengan masyarakat setempat.
- Pengembangan pariwisata seharusnya disesuaikan dengan irama alam dan prinsip ekologi, peka terhadap budaya lokal, agama dan seharusnya tidak menempatkan penduduk setempat posisi terendah.
- Jumlah kunjungan wisata suatu area seharusnya tidak melebihi penduduk setempat.

Upaya yang dilakukan pemerintah Aceh dalam meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara dengan menggunakan strategi *Branding, Advertising and Selling* (BAS). Strategi promosi BAS (*Branding, Advertising and Selling*) dengan komposisi penggunaan anggaran sebesar 50 persen untung *Branding*, 30 persen untuk *advertising* dan 20 persen untuk *selling*. Kegiatan *Branding* 100 persen dilakukan oleh pemerintah, kegiatan *advertising* 50 persen

pemerintah dan 50 persen pelaku bisnis pariwisata, sedangkan kegiatan *selling* 100 persen dilakukan pelaku bisnis (pemerintah hanya memfasilitasi). Untuk aktivitas *Branding* pemerintah telah memulainya sejak tahun 2012 dengan pencanangan “Visit Aceh Year 2013” dengan tegline “Aceh Fantastic Destination”. Branding tahun kunjungan wisata ke Aceh akan berlangsung selama 5 tahun tahun 2013 s.d 2017. Pada tahun 2015 Provinsi Aceh ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata sebagai salah satu destinasi wisata syariah. Untuk memperkuat pencitraan maka Pemerintah Aceh perlu melakukan rebranding pariwisata sebagai panduan bagi seluruh stakeholder industri pariwisata. Program/kegiatan yang berkaitan dengan Advertising meliputi : MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition), promosi wisata melalui media massa (media cetak, media elektronik dan media internet), pasar wisata, dan lain-lain. Sedangkan kegiatan *Selling* yang dominan dilakukan oleh stakeholder pariwisata, pemerintah berperan sebagai fasilitator dan katalisator untuk merangsang pertumbuhan pasar pariwisata melalui kegiatan rapat koordinasi, sertifikasi, fasilitasi pembentukan asosiasi , dan sosialisasi.

Selain itu upaya yang telah dilakukan dalam mengembangkan suatu objek wisata , baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak masyarakat di sekitar lokasi adalah sebagai berikut:

- Mengembangkan lebih jauh potensi objek-objek wisata yang dimiliki dalam menunjang kepariwisataan di daerah Kabupaten Aceh Tengah
- Mempromosikan objek-objek wisata tersebut melalui media elektronik, media cetak , ataupun dari individu ke individu lain dengan cara membuat even-even acara seperti pemelihan duta wisata, Expo gayo dan festival

kopi dengan menampilkan kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Aceh Tengah untuk mempromosikan wisata yang ada di Aceh Tengah

- Membangun segala fasilitas yang dibutuhkan oleh parawisatawan dalam kegiatan liburannya agar wisatawan merasa nyaman dan akhirnya berkeinginan untuk berkunjung kembali seperti tempat penginapan dan objek wisata
- Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Alam (SDM) dalam hal memberikan pelayanan terhadap wisatawan seperti pemandu wisata (guide), dan lain sebagainya.
- Mengadakan acara tradisional tahunan yaitu pacuan kuda yang dilaksanakan dalam satu tahun 2 kali yaitu pada perayaan ulang tahun Kota Takengon dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

3.7 Kendala Dalam Melestarikan dan Mengembangkan Objek Wisata di Kabupaten Aceh Tengah

Setiap kegiatan pasti ada kendala yang akan dihadapi begitu pun halnya dengan pengembangan objek wisata. Upaya pengembangan objek wisata merupakan suatu aspek yang kompleks dimana menyangkut segala hal. Mulai dengan pembagunaan dan pengembangan fasilitas, meningkatkan kemampuan masyarakat setempat, dan menjaga kelestarian lingkungan agar tetap seimbang serta hal lainnya.

Dalam upaya pengembangan objek wisata di daerah Kabupaten Aceh Tengah terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, seperti :

- Masih minimnya infrastruktur pendukung serta kondisi aksesibilitas yang kurang bagus di beberapa daerah.
- Kurangnya pihak investor yang menanamkan modalnya dan partisipasi pihak-pihak terkait lainnya.
- Keamanan dan kenyamanan yang masih belum terjaga dengan baik dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal menjaga keasrian dan kebersihan, serta pelayanan yang baik terhadap wisatawan
- Belum optimalnya jumlah kunjungan wisata pada destinasi wisata
- Belum berkembangnya usaha pendukung pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif
- Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah

3.8 Hasil Kuisisioner

Dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Aceh Tengah, peneliti mengambil 30 responden untuk menjawab pertanyaan yang telah peneliti buat untuk memperkuat hasil penelitian ini. Berikut tabel pernyataan wisatawan selama berkunjung ke obyek wisata yang berada di Kabupaten Aceh Tengah.

Identitas Responden

Jenis Kelamin		Pekerjaan		
Perempuan	Laki-laki	Wiraswasta	PNS	Lain-lain
12	18	6	6	18
Total : 30 orang		Total : 30 orang		

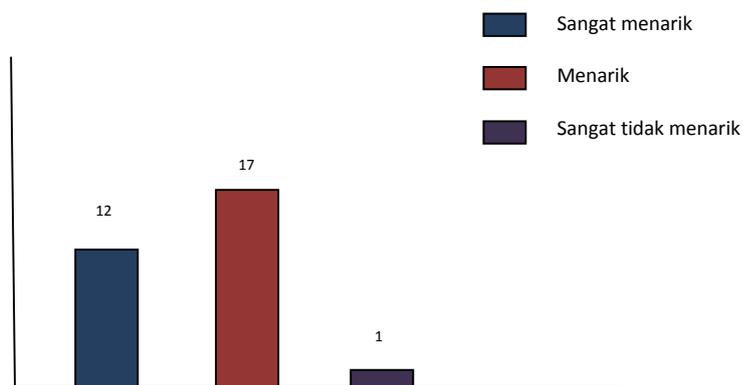
Kabupaten/Kota Asal Wisatawan

No	Kabupaten/ Kota Asal	Jumlah
1.	Banda Aceh	4
2.	Medan	5
3.	Langsa	1
4.	Sabang	2
5.	Padang	2
6.	Lhoksemawe	1
7.	Jakarta	3
8.	Aceh Singkil	1
9.	Yogyakarta	1
10.	Semarang	1
11.	Subusalam	2
12.	Jambi	1
13.	Aceh Pidie	1
14.	Brandan	1
15.	Tapak Tuan	1
16.	Bandung	1
17.	Aceh Utara	2
Total		30

Dari tabel tersebut dapat dilihat identitas responden yang menjadi penelitian ini. Jika dilihat dari identitas responden berdasarkan jenis kelamin terdapat 12

responden berjenis kelamin perempuan dan 18 berjenis kelamin laki-laki. Dari 30 responden yang diteliti, ternyata terdapat 6 responden yang pekerjaannya wiraswasta dan yang pekerjaan PNS terdapat 6 responden juga. Kemudian 18 responden lainnya tergolong dalam jenis pekerjaan lainnya. Jika dilihat dari Kabupaten/ Kota asalnya, maka yang paling banyak berasal dari Kota Banda Aceh. Kemudian wisatawan yang juga banyak berasal dari Medan. Dapat dilihat dari tabel tersebut, bahwa yang berkunjung ke wisata Kabupaten Aceh Tengah itu berasal dari daerah yang berbeda-beda. Berikut pernyataan responden mengenai objek wisata di Aceh Tengah

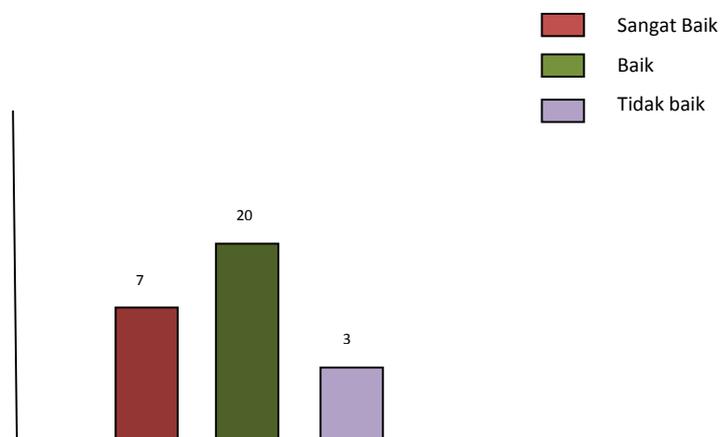
Pemandangan alam pada objek wisata yang saya kunjungi sangat menarik



Mengacu pada hasil jawaban responden atas koesioner tersebut persentase tertinggi menyatakan 17 responden setuju, 12 responden sangat setuju dan 1 responden menyatakan tidak setuju dengan pemandangan obyek wisata yang ada di objek wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi dan dengan kondisi alam yang sangat indah, dan udara yang sejuk dan mempunyai pemandangan yang yang

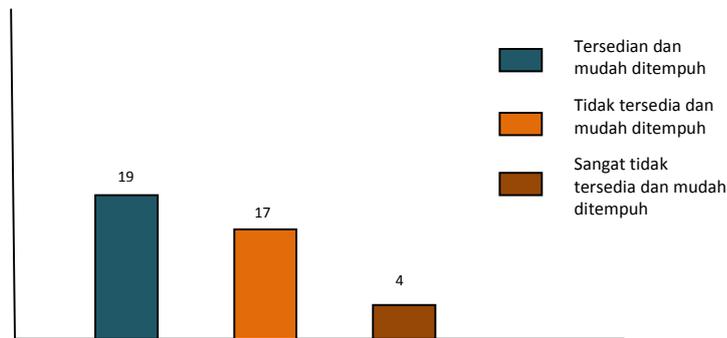
dikelilingi oleh pengunungan. Disini kita juga bisa melihat pemandangan Danau Laut Tawar yang merupakan danau terluas di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam

Fasilitas Pelayanan hotel dan rumah makan



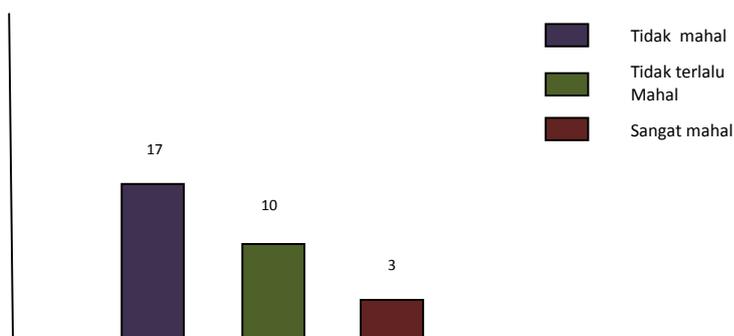
Untuk fasilitas dan pelayanan hotel dan rumah makan 20 responden menyatakan baik dan 7 responden menyatakan sangat baik dan 3 responden menyatakan tidak baik. Untuk fasilitas penginapan yang berada di Aceh Tengah sangat baik dan nyaman untuk wisatawan dengan letak yang strategis di pusat kota dan pelayanan yang diberikan membuat wisatawan merasa betah dan nyaman. Sedangkan untuk rumah makan, wisatawan tidak terlalu sulit mencari rumah makan karena banyak rumah makan yang tersedia di lokasi objek dan pelayanan yang diberikan baik.

Akses jalan menuju objek wisata tersedia dan mudah ditempuh



Pada variabel aksesibilitas pernyataan yang mendapat respon negatif adalah pernyataan jalan menuju lokasi objek wisata tersedia dan mudah ditempuh yaitu 19 responden yang menyatakan tidak tersedia dan mudah ditempuh, 4 responden menyatakan sangat tidak tersedia dan mudah ditempuh dan 17 menyatakan tersedia dan mudah ditempuh. Sebahagian sarana menuju lokasi objek wisata masih rusak seperti objek wisata itu belah di Kecamatan Linge, jalan yang dilalui masih banyak yang belum diperbaiki dan untuk menuju obyek wisata tersebut rawan longsor sedangkan untuk petunjuk jalan menuju obyek wisata masih banyak belum tersedia misalnya menuju obyek wisata kebun apel, lut kucak gearang, air terjun karang ampar, dan lain-lain

Biaya dan Harga yang dikeluarkan selama berada di objek wisata



Untuk biaya yang dikeluarkan selama berada di objek wisata yaitu 17 responden menyatakan tidak mahal dan 10 responden menyatakan tidak terlalu mahal dengan pernyataan tidak terlalu mahal biaya yang dikeluarkan. Untuk penginapan, banyak penginapan yang tersedia di Takengon mulai dari wisma, hotel dan losmen dan layanan yang diberikan oleh penginapan sangat nyaman bagi wisatawan dan untuk restoran/rumah makan wisatawan tidak terlalu sulit untuk menemukannya karena banyak tersedia restoran/rumah makan terutama dipertokoannya disini juga wisatawan dapat menikmati makan khas gayo yang diolah menggunakan ikan depik seperti pengat dan dedah. Biaya/harga yang dikeluarkan selama berwisatawan tidak terlalu mahal. Masih dalam batas normal.

Dari hasil pembagian kuisioner terhadap wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Aceh Tengah/ Takengon atau disebut negeri diatas awan dapat disimpulkan bahwa keindahan alam yang ada di Takengon sangat indah, udara yang sejuk dan pemandangan yang sangat indah terutama jika dilihat dari puncak pantan terong dari sana wisatawan bisa melihat suasana kota Takengon dan keindahan danau laut tawar dari kejauhan. Pemandangan alam danau lau tawar memanjakan mata, selain ketenangan air, hamparan pengunungan berkabut dan pohon pinus yang mengitari danau. Kombinasi dataran, berbukitan, dan perairan di sekelilingi danau laut tawar menyajikan keindahan yang menawan. Salah satu acara tradisonal yang bisa kita datangi jika berkunjung ke Aceh Tenga adalah Pacuan kuda, adalah salah satu acara tradisonal yang sampai saat ini masih dilaksanakan. Selain pacuan kuda takengon terkenal akan kopinya yaitu kopi gayo atau kopi arabika, wisatwan bisa menikmati secangkir kopi dengan udara

yang sejuk dan pemandangan yang indah. Untuk penginapan, banyak penginapan yang tersedia di Takengon mulai dari wisma, hotel dan losmen dan layanan yang diberikan oleh penginapan sangat nyaman bagi wisatawan dan untuk restoran/rumah makan wisatawan tidak terlalu sulit untuk menemukannya karena banyak tersedia restoran/rumah makan terutama dipertokoannya disini juga wisatawan dapat menikmati makan khas gayo yang diolah menggunakan ikan dipik seperti pengat dan dedah. Biaya/harga yang dikeluarkan selama berwisatawan tidak terlalu mahal. Masih dalam batas normal.

Akan tetapi masih ada jalan menuju lokasi obyek wisata dalam kondisi jalan yang kurang baik seperti objek wisata itu belah di Kecamatan Linge, jalan yang dilalui masih banyak yang belum diperbaiki dan untuk menuju obyek wisata tersebut rawan longsor sedangkan untuk petunjuk jalan menuju obyek wisata masih banyak belum tersedia misalnya menuju obyek wisata kebun apel, lut kucak gegarang, air terjun karang ampar, dan lain-lain. Hal ini sangat diperlukan bagi wisatawan yang akan berkunjung ke objek wisata. Dan untuk kebersihan masih ada tempat wisata yang belum terjaga kebersihannya hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Aceh Tengah dikenal dengan penduduknya yang ramah hal ini membuat wisatawan yang berkunjung ke Aceh Tengah menjadi lebih nyaman

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Analisis data dan Pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengembangan dan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisata yang terus meningkat, terdapat banyak obyek wisata yang bisa dikunjungi oleh wisatawan, akan tetapi untuk saran dan prasarana belum optimal dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah.
2. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam mengembangkan sektor pariwisata yakni dengan mempromosikan obyek-obyek wisata yang dimiliki melalui media elektronik, media cetak dengan menampilkan pertunjukan seni seperti festival kopi, expo gayo, duta wisata. Sektor pariwisata tidak memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tengah. Hal ini dikarenakan belum meratanya sarana dan prasarana yang ada dikawasan obyek wisata sebagai penunjang untuk menarik minat wisatawan serta belum optimalnya strategi pemerintah dalam meningkatkan pariwisata.

5.2 Saran

Berdasarkan Analisis data dan Pembahasan maka peneliti memberikan berbagai saran sebagai berikut :

1. Pemerintah atau Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah agar lebih mengutamakan pengelolaan dan pengembangan pada objek pariwisata yang sangat potensial dan banyak akan manfaatnya, sehingga dapat membantu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Tengah.
2. Masyarakat dalam hal ini harus ikut berperan aktif dalam mengembangkan obyek wisata, hal tersebut dapat ditunjukkan dengan menjaga fasilitas sarana dan prasarana yang ada dan menjaga keasrian serta keindahan alam yang telah Allah SWT anugerahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Yunus. (2010). *Starategi Membaca Teori dan Pembelajaran*. Bandung: Risqi Press.
- A, Yoeti, Oka. (2005). *Perencanaan Starategi Pemasaran Daerah Tujuan Wisata* Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Dematoto, Aryo. 2008. *Starategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Karo Dalam Mengembangkan Sektor Priwisata*. Medan: USU press.
- Davey, Patrick. (2005). *Medicane At A Glance*. Ahli Bahasa: Rahmalia. A,dkk. Jakarta: Erlanga
- Josef Riwu Kaho, (2003). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi*
- Nyoman S. Pendit. (2006). *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana. Edisi Terbaru*. Jakarta. PT Pradaya Pramita.
- Pitana, I Gede. (2005). *Sosiologi Pariwsata*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Pelaksanaan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah.
- Santoso, Slamet. (2006). *Dinamika Kelompok*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. (2001). *Sosiologi*: PT. Rajagrafindo Persada
- Sugiono. 2001. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Afabeta.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 1997 tentang Pelaporan atau Pemberitahuan Perolehan Atas Tanah dan Bagunan.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan.

Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas tindak pidana Korupsi.

Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 169-171.

Wahab, Salah. (2003). *Manajemen Kepariwisataaan*. Jakarta: Pradnya Paramitha.

Wardiyanta. (2006). *Metode Penelitian Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.

Website

www.humas.acehtengahkab.go.id

www.acehtengahkab.bps.go.id

www.bappeda.acehtengahkab.go.id

Judul :

**ANALISI PENINGKATAN RETRIBUSI DAERAH MELALUI
PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN ACEH TENGAH**

A. PETUNJUK PENGISIAN

1. Mohon dengan hormat bantuan dan kesedian bapak/ibu untuk mengisi seluruh pernyataan yang ada dengan sejujur-jujurnya .
2. Beri tanda ceklis () pada salah satu pilihan jawaban yang bapak/ibu/saudara yang dianggap sesuai dengan keadaan sebenarnya.
3. Ada lima alternatif jawaban yang disediakan yaitu :
 - a. Sangat Setuju (SS)
 - b. Setuju (S)
 - c. Tidak Setuju (TS)
 - d. Sangat Tidak Setuju (STS)
4. Seluruh jawaban yang bapak/ibu/saudara berikan dianggap benar dan terjamin kerahasiaannya.
5. Instrumen berupa ceklist ini hanya digunakan untuk kepentingan penelitian semata, tidak untuk yang lain.
6. Terimakasih atas jawaban yang bapak /ibu /saudara berikan.

B. KARAKTERISTIK RESPONDEN

- a. Nama/kode respon :
- b. Jenis kelamin :
 - o Laki laki
 - o perempuan
- c. Alamat :
- d. Telepon (jika ada) :
- e. Tingkat pendidikan :
 - o SD
 - o SMP
 - o SMA
 - o SARJANA
- f. Pekerjaan :
 - o Wiraswasta
 - o PNS
 - o Dll

C.PERNYATAAN

No	Atraksi	SS	S	TS	STS
1.	Pemandangan alam pada obyek wisata yang saya kunjungi sangat menarik				
2.	Kondisi alam berupa pantai/gunung sangat indah dan menarik				
3.	Souvenir yang berhubungan dengan obyek wisata banyak tersedia				
4.	Terdapat festival atau upacara budaya setempat yang sangat menarik				
	Fasilitas dan Pelayanan	SS	S	TS	STS
5.	Kualitas hotel/penginapan baik				
6.	Pelayanan hotel/penginapan baik				
7.	Kualitas restoran/rumah makan baik				
8.	Pelayanan restoran/rumah makan baik				
	Aksesibilitas	SS	S	TS	STS
9.	Jalan menuju lokasi obyek wisata tersedia dan mudah ditempuh				
10.	Kualitas jalan menuju lokasi obyek wisata dalam kondisi baik				
11.	Tranfortasi umum sepanjang obyek wisata tersedia dan mudah ditempuh				
12.	Petunjuk jalan sepanjang obyek wisata tersedia				
	Citra Obyek Wisata	SS	S	TS	STS
13.	Keramahan masyarakat sekitar obyek wisata sangat baik				
14.	Kebersihan sekitar obyek wisata sangat baik				
15.	Keamanan sekitar obyek wisata sangat baik				
	Biaya /Harga	SS	S	TS	STS
16.	Harga/biaya yang dikeluarkan selama obyek wisata jelas dan tidak terlalu mahal				
17.	Harga makan di obyek wisata tidak terlalu mahal				

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

Pada hari ini RAFNI tanggal Rabu, 09 Januari 2019 telah diselenggarakan seminar jurusan RAFNI menerangkan bahwa :

N a m a : RAFNI
N .P.M. : 1505180002
Tempat / Tgl.Lahir : Takengon, 04 Juni 1997
Alamat Rumah : Danau Laut Tawar No.85 Lingkungan IV
JudulProposal : ANALISIS PENINGKATAN RETRIBUSI DAERAH MELALUI
PEMGEMBANGAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN ACEH
TENGAH

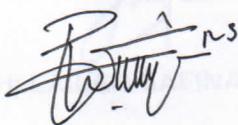
Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I
Bab II
Bab III	- Analisis Data + dgn kuesioner
Lainnya	↳ buat kuesioner
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, Rabu, 09 Januari 2019

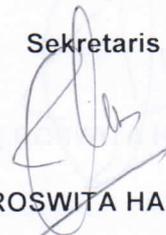
TIM SFMINAR

Ketua



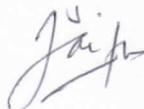
Dr.PRAWIDYA HARIANI RS., S.E., M.Si.

Sekretaris



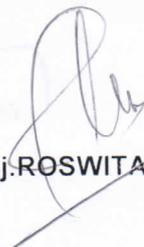
Dra.Hj.ROSWITA HAFNI, M.Si.

Pembimbing



Dra.Hj.LAILAN SAFINA, M.Si.

Pembanding



Dra.Hj.ROSWITA HAFNI, M.Si.



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Ekonomi Pembangunan yang diselenggarakan pada hari *Rabu, 09 Januari 2019* menerangkan bahwa:

Nama : RAFNI
N .P.M. : 1505180002
Tempat / Tgl.Lahir : Takengon, 04 Juni 1997
Alamat Rumah : Danau Laut Tawar No.85 Lingkungan IV
JudulProposal : ANALISIS PENINGKATAN RETRIBUSI DAERAH MELALUI
PEMGEMBANGAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN ACEH
TENGAH

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan

pembimbing : *Dra.Hj.LAILAN SAFINA, M.Si.*

Medan,Rabu, 09 Januari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

Dr.PRAWIDYA HARIANI RS,SE., M.Si.

Sekretaris

Dra.Hj.ROSWITA HAFNI, M.Si.

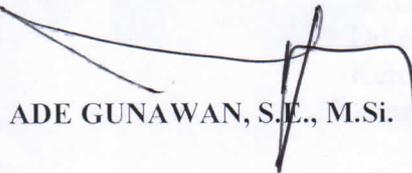
Pembimbing

Dra.Hj.LAILAN SAFINA, M.Si.

Pembanding

Dra.Hj.ROSWITA HAFNI, M.Si.

Diketahui / Disetujui
A.n. Dekan
Wakil Dekan - I



ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : RAFNI
 N.P.M : 1505180002
 Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
 Judul Skripsi : ANALISIS PENINGKATAN RETRIBUSI DAERAH MELALUI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN ACEH TENGAH

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
14-02-2019	- Jambak tahun pengamatan dan terdapat analisisnya	} <u>hu</u>	
20-02-2019	- Data ISD, ambil yg lebih lengkap, hitung pertumbuhan nya	} <u>hu</u>	
27-02-2019	- Buat kesimpulan, saran dan perbaikan daftar pustaka. - lengkapi abstrak, daftar tabel ketampungan	} <u>hu</u>	
13-03-2019	Perbaiki abstrak	<u>hu</u>	
14-03-2019	Telah selesai diperbaiki dan arc untuk di/mas lebih lanjut	} <u>hu</u>	

Pembimbing Skripsi

Dra. Hj. LAILAN SAFINA HSB, M.Si

Medan, 14 Maret 2019
 Diketahui /Disetujui
 Ketua Program Studi
 Ekonomi Pembangunan

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : RAFNI
N.P.M : 1505180002
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Proposal : ANALISIS PENINGKATAN RETRIBUSI DAERAH MELALUI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN ACEH TENGAH

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
06-12-2018	- Perbaiki latar belakang masalah	} <u>Lu</u>	
	- " identifikasi, batasan dan rumusan masalah serta tujuan dan manfaat penelitian		
	- Perbaiki kerangka penelitian		
	- " definisi operasional		
10-12-2018	- Perbaiki lagi latar belakang	} <u>Lu</u>	
	- Masukkan data pendukung		
	- Perbaiki lagi kerangka pembeur		
	- Perbaiki teknik analisis data		
17-12-2018	- Tambah identifikasi masalah	} <u>Lu</u>	
	- perbaiki daftar pustaka		
18-12-2018	Telah selesai diperiksa dan acc untuk seminar proposal	} <u>Lu</u>	

Pembimbing Proposal

Dra. Hj. LAILAN SAFINA HSB, M.Si

Medan, Desember 2018
 Diketahui /Disetujui
 Ketua Program Studi
 Ekonomi Pembangunan

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 14/JDL/SKR/EP/FEB/UMSU/8/11/2018

Kepada Yth.

Medan, 8/11/2018

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rafni
NPM : 1505180002
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : -

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

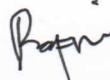
Identifikasi Masalah : -

Rencana Judul : 1. Analisis peningkatan retribusi daerah melalui pengembangan objek Wisata di Kabupaten Aceh Tengah
2. -
3. -

Objek/Lokasi Penelitian : -

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon


(Rafni)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 14/JDL/SKR/EP/FEB/UMSU/8/11/2018

Nama Mahasiswa : Rafni
NPM : 1505180002
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : -
Tanggal Pengajuan Judul : 8/11/2018
Judul yang disetujui Program Studi : Nomor, atau;
Alternatif judul lainnya.....
(Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
Nama Dosen pembimbing : LAILAN SAFIHA H.R. (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing :
(Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

(Dr. Prawidya Hariani RS., SE., M.Si.)

Medan, 26 November 2018

Dosen Pembimbing

(.....)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : Rafni
NPM : 1505180002
Konsentrasi :
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi/Perpajakan/Manajemen/Ekonomi
Pembangunan
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan 5 - 1 2019
Pembuat Pernyataan



NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : ~~8197~~ TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2018

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**
Pada Tanggal : **06 Desember 2018**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **RAFNI**
N P M : **1505180002**
Semester : **VII (Tujuh)**
Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**
Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Peningkatan Retribusi Daerah Melalui Pengembangan Objek Wisata Di Kabupaten Aceh Tengah)**

Dosen Pembimbing : **Dra.Hj.LAILAN SAFINA,M.Si.**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah dikeluarkannya Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 06 Desember 2019**
4. Revisi Judul.....

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 28 Rabiul Awwal 1440H
06 Desember 2018 M



- Tembusan :
1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
 2. Peringgal.